

Majalah



Biro Pemberitaan Parlemen

# PARLEMENTARIA

## Perlu Panja Bongkar Skandal Pertamina



EDISI 243  
TH. 2025



7 25272 73070 6



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analisis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**

M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi

**ANALIS MEDIA**

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdlana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**

M. Chairudin, S.Sos, M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI**

Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

## LAPORAN UTAMA



## Perlu Panja Bongkar Skandal Pertamina

4

### PROLOG

Perlu Panja Bongkar Skandal Pertamina

6

### LAPORAN UTAMA

- Mendesak Pengusutan Tuntas Mega Korupsi
- Sidak ke SPBU, Pastikan Kualitas BBM
- Menanti Taji Kejagung

16

### SUMBANG SARAN

Ketahanan dan Infrastruktur Energi Pertamina di Tengah Mega Skandal Korupsi

18

### PENGAWASAN

Kenaikan Harga Jelang Hari Besar, Haruskah Selalu Jadi Fenomena

20

### ANGGARAN

Danantara, Langkah Strategis Perkuat Ekosistem Investasi

22

### LEGISLASI

Revisi UU PPMI : Mengangkat Martabat Pejuang Devisa

24

### FOTO BERITA

28

### PROFIL

Aqib Ardiansyah  
Politisi Muda Mengabdikan Untuk Rakyat



**PENGAWASAN**

**Kenaikan Harga Jelang Hari Besar, Haruskah Selalu Jadi Fenomena**

**18**

**ANGGARAN**

**20**

**Danantara, Langkah Strategis Perkuat Ekosistem Investasi**

**SOROTAN**

**58**

**PHK Massal Pukulan Besar Bagi Industri Nasional**

- 32 KUNKER**
- 58 SOROTAN**  
PHK Massal Pukulan Besar Bagi Industri Nasional
- 60 LIPUTAN KHUSUS**  
Sidang Komite Status Perempuan. Perkenalkan Perjuangan RA Kartini
- 62 DAPIL**
- 70 PERNIK**  
Ramadhan Ngantor Harmoni Ibadah dan Profesionalisme
- 72 KIAT SEHAT**  
Kenali Kehamilan Ektopik Sejak Dini
- 74 WISATA**  
Candi Cetho Keindahan Sejarah di Atas Puncak Gunung Lawu
- 76 LENZA PARLE**  
Serba-serbi Ramadan Berburu Takjil, Ngabuburit, Hingga Kue Khas Lebaran

SCAN QR  
UNTUK BERITA TERKINI  
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id

DPR RI DPR RI @dpr\_ri @dpr\_ri @dpr\_ri @dpr\_ri

www.dpr.go.id

PROLOG

# Perlu Panja Bongkar Skandal Pertamina



## Skandal korupsi besar yang melibatkan PT Pertamina (Persero) kembali mengguncang Indonesia. BUMN yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian bangsa ini justru terjerat dalam praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.



**SKANDAL** yang berlangsung sejak 2018 hingga 2023 ini mencerminkan kebobrokan tata kelola yang ada di tubuh perusahaan

negara terbesar di sektor energi ini. Pada 25 Juni 2025, PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa pengoplosan BBM yang dilakukan oleh Direksi PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, telah merugikan negara hingga hampir Rp1.000 triliun.

Manipulasi bahan bakar RON 90 (setara Peralite) dengan RON 92 (setara Pertamina) mengakibatkan konsumen mendapatkan BBM dengan kualitas yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Kerugian negara pada tahun 2023 saja mencapai Rp193,7 triliun, sebuah

“

**Praktik pengoplosan berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang begitu lama.**

Darmadi Durianto  
Anggota Komisi VI DPR RI

angka kerugian yang sangat besar.

Skandal ini memicu reaksi keras dari DPR RI dan masyarakat. Komisi VI DPR RI mendesak agar kasus ini diselesaikan dengan tuntas. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dan Mufti Anam dengan tegas mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Keduanya menuntut Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengungkap mega skandal ini, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Parlemen menyoroti ketidakmampuan pengawasan internal Pertamina, yang memungkinkan praktik pengoplosan berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang begitu lama. Darmadi Durianto, bahkan menyerukan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap lebih dalam tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Sementara Mufti Anam mengeritik keras permintaan maaf yang disampaikan Pertamina, karena dinilai tidak cukup menggantikan kerugian yang dialami konsumen.

Pembenahan total manajemen Pertamina jadi keniscayaan untuk segera dilakukan. Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo turut berkomentar. Katanya, Kejagung harus bergerak cepat memastikan seluruh aliran dana korupsi dapat dilacak dan semua pihak yang terlibat—baik di dalam maupun di luar perusahaan—mendapatkan sanksi setimpal.

Kasus ini bukan hanya tentang kerugian negara yang besar, tetapi juga tentang bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi besar, seperti Pertamina, dapat runtuh begitu saja. Rakyat Indonesia yang selama ini mengandalkan Pertamina untuk kebutuhan energi, merasa dikhianati, karena perusahaan migas yang seharusnya melayani publik justru melakukan tindakan yang merugikan konsumen dan negara.

Saat ini, pertanyaan besar yang menggema adalah, apakah Kejaksaan mampu mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang melibatkan sejumlah oknum dan perusahaan swasta dalam skandal ini? Selain itu, bagaimana Pertamina mengembalikan kepercayaan publik yang telah hancur akibat praktik korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun ini.

Sementara Kejaksaan melakukan penyelidikan, masyarakat tentu berharap kasus ini menjadi titik balik bagi perbaikan sistem tata kelola perusahaan negara yang selama ini sering dipandang sebagai area rawan korupsi. Kepercayaan publik pada BUMN seharusnya diperoleh melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, bukan dengan manipulasi dan pengkhianatan terhadap negara.

Di tengah ketegangan ini, semua pihak berharap penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan, agar Pertamina dapat melakukan perombakan besar-besaran di tubuh perusahaan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Kasus ini bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap tata kelola energi di Tanah Air.

Reforma tata kelola di tubuh Pertamina kini menjadi agenda krusial yang harus segera dijalankan, demi menyelamatkan BUMN dan negara dari praktik koruptif yang masif dan mengerikan. . .



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.

FOTO: DEP/VEL

# Mendesak Pengusutan Tuntas Mega Korupsi

**Skandal korupsi pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengguncang PT Pertamina (Persero) menjadi sorotan tajam. Kasus korupsi dengan kerugian mencapai Rp193,7 triliun pada tahun 2023, menggoyahkan kepercayaan publik terhadap salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia tersebut.**



## KEJAKSAAN

Agung (Kejagung) sebagai institusi yang menangani kasus ini, didesak mempercepat dan progresif

menangani kasus yang telah menyeret sembilan nama sebagai tersangka ini. Komisi hukum DPR RI pun tak tinggal diam. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III mengatakan, Kejagung harus dapat mengusut tuntas kasus besar tersebut.

la menuntut pertanggungjawaban kerugian negara yang merugikan

masyarakat sebagai konsumen Pertamina. "Ini harus tegas dan tuntas, seperti saat Kejagung mengusut kasus-kasus kakap lainnya. Semua tersangka harus diseret dan bertanggung jawab," katanya. Tak hanya itu, pengusutan kasus korupsi yang sangat sistematis ini, diharapkan menjerat seluruh pelaku yang terlibat. Kerugian yang ditimbulkan sejak 2018 tersebut, hampir mencapai Rp1 kuadriliun.

"Sisa umur hidup para tersangka pun tidak akan cukup untuk menebus semua kerugian dan dampak yang ditimbulkan," kata politisi Partai NasDem ini. Sahroni pun turut mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) cepat bergerak, melacak aliran dana korupsi tersebut. Sebab, dia menilai

kasus tersebut merupakan mega korupsi, bahkan super korupsi.

Dorongan dari PPAK dalam melacak aliran korupsi, dinilai dapat membantu penegak hukum memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh aksi korupsi tersebut. "Ini harus tegas dan tuntas, seperti saat Kejagung mengusut kasus-kasus kakap lainnya, semua tersangka harus diseret dan bertanggung jawab," tegasnya.

Anggota Komisi III lainnya, Bambang Soesatyo juga mendesak penanganan kasus mega korupsi ini agar tidak menjadi "bola liar" yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kejagung diminta fokus, tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat.

Publik, sebut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, meyakini dana hasil korupsi tersebut tidak mungkin disimpan

dan dinikmati di rekening bank milik kesembilan tersangka. Ia menduga skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun, mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri.

Untuk itu, pelacakan aliran dana juga penting dalam kasus ini untuk mengetahui siapa saja yang terlibat di luar dari tersangka yang telah ditetapkan. "Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri," ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat aktif memantau perkembangan kasus tersebut. Kejagung juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia, dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman setimpal. "Masyarakat

sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal," tandasnya.

Anggota Komisi XII Ratna Juwita juga menegaskan hak konsumen perlu diperhatikan dalam memilih kualitas BBM yang sesuai dengan usia kendaraan mereka, meskipun RON seperti 92, 95, dan 98, terlihat sama. Ia menjelaskan bahwa yang seharusnya diukur adalah kesesuaian BBM dengan mesin kendaraan yang digunakan oleh konsumen.

"Konsumen memiliki hak untuk memilih BBM yang sesuai dengan kondisi mesin kendaraan mereka. Yang bisa diukur itu dari mesin kendaraan, apakah bermasalah dengan jenis BBM tertentu atau tidak," tegas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut. — **bia/mh**



Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.

# Sidak ke SPBU, Pastikan Kualitas BBM

Publik tiba-tiba dikejutkan dengan informasi kualitas bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU yang dioplos. Jenis yang dioplos RON (Research Octane Number) 90 Pertalite ke RON 92 Pertamax.



FOTO: RUMI/VEL

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi bersama dengan Anggota Komisi XII lainnya, saat melakukan sidak ke SPBU Pertamina di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).



ISU ini memunculkan kekecewaan masyarakat, yang merasa dikhianati oleh perusahaan migas kebanggaan

nasional. Komisi XII DPR RI pun bergerak cepat merespon informasi tersebut.

Sebagai respons terhadap kegelisahan publik, Komisi XII menggelar rangkaian rapat dengar pendapat dan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU.

Wakil Ketua Komisi XII Bambang

Haryadi, memimpin rapat Februari silam dengan sejumlah perusahaan migas ternama, termasuk Pertamina Patra Niaga, Shell Indonesia, Vivo Energy Indonesia, dan PT AKR. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dugaan praktik pengoplosan.

Komisi XII ingin memastikan bahwa kualitas bahan bakar yang



FOTO: RUNU/VEL

Komisi XII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, saat sidak ke SPBU Shell di Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).

dijual kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Bambang juga menyinggung sejarah penggunaan RON 88 pada masa Orde Baru, yang kini digantikan oleh Peralite dengan RON 90. Sebagai pihak yang paling banyak disorot, Pertamina Patra Niaga melalui Plt Dirut Mars Ega Legowo Putra memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut.

Menurutnya, Pertamina menerima produk BBM, baik RON 90 (Peralite) maupun RON 92 (Pertamax), dalam bentuk sesuai dengan spesifikasinya dari kilang dalam negeri dan luar negeri. "Kami menegaskan bahwa tidak ada perubahan RON, baik itu Peralite maupun Pertamax, dan kami melakukan serangkaian pengujian kualitas di terminal-terminal kami," ujar Mars.

Sidak ke sejumlah SPBU pun tak terelakkan. Sebagai tindak lanjut

dari rapat dengar pendapat, Komisi XII sidak ke beberapa SPBU untuk memastikan kualitas BBM yang beredar di pasaran. Pada 27 Februari 2025, sidak pertama dilakukan di SPBU Pertamina Cibubur, Jakarta Timur. Bambang bersama sejumlah anggota komisi lainnya, melakukan pengecekan langsung terhadap

“  
**Produk BBM yang beredar harus melalui sertifikasi dan pengujian kualitas oleh Lemigas sebelum masuk ke pasar.**

kualitas Pertamax yang dijual. Dalam sidak ini, mereka mengambil sampel 1 liter Pertamax untuk diuji di laboratorium Lemigas.

Bambang menegaskan bahwa semua produk BBM yang beredar harus melalui sertifikasi dan pengujian kualitas oleh Lemigas sebelum masuk ke pasar. "Kami ingin memastikan bahwa produk BBM yang ada di pasaran telah melalui uji kualitas yang ketat, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang salah," tandasnya.

Usai sidak di SPBU Pertamina, Komisi XII melanjutkan inspeksi ke SPBU Shell yang terletak tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Sidak ini bertujuan membandingkan kualitas produk Pertamax milik Pertamina dengan produk BBM dari Shell, yaitu Supershell. Sidak ini merupakan bagian dari program sampling ulang yang rutin dilakukan untuk

memastikan kesesuaian kualitas produk BBM yang dijual di pasaran.

"Secara kasat mata, baik Pertamina maupun Supershell terlihat sama. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada hasil uji laboratorium yang akan dilakukan oleh Lemigas," ujar Bambang. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kualitas yang objektif dan transparan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh spekulasi yang tidak berdasar.

### Dukung Kejagung

Di tengah isu kualitas BBM, Komisi XII juga menyoroti dugaan korupsi



**Kasus ini merupakan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018-2023**



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, beserta tim, saat sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).

yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga. Setelah melakukan sidak ke SPBU, Bambang Haryadi dan anggota Komisi XII lainnya

menyampaikan dukungannya terhadap pengungkapan kerugian negara dari praktik pengoplosan BBM di PT Pertamina.

Kasus ini merupakan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada periode 2018-2023. Kejaksanaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun, dengan beberapa komponen kerugian yang mencakup ekspor minyak mentah, impor minyak melalui broker, serta subsidi dan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.

"Kami mendukung penuh langkah-langkah Kejaksanaan Agung dalam mengungkap kasus ini dan mengungkapkan kerugian negara. Kami tidak akan terlibat dalam ranah hukum. Kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengusutnya sampai tuntas," tegas Bambang. **pun/mh**



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.

# Menanti Taji Kejagung

**Praktik korupsi di PT Pertamina terbongkar. Praktif koruptif ini terjadi antara tahun 2018-2023. Kerugian negara yang digasak juga tak tanggung-tanggung, Rp193,7 triliun pada 2023. Tujuh tersangka sudah diteteapkan. Modus korupsinya pengoplosan BBM jenis pertalite ke Pertamax. Tak hanya itu, volume impor minyak mentah juga dimanipulasi.**



**KASUS** korupsi Pertamina yang mencapai nilai Rp193 triliun merupakan salah satu skandal korupsi besar yang pernah

terungkap di Indonesia. Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan dana. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera menyelesaikan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina tahun 2018-2023.

Burhanuddin juga telah memerintahkan Jampidsus segera menghitung kerugian keuangan negara dibantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, jumlah kerugian negara

sebesar Rp193,7 triliun merupakan perhitungan sementara oleh penyidik. Para auditor BPK juga masih terus menghitung.

Kejagung mengungkapkan, korupsi itu terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari beberapa pejabat di PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional yang diduga tidak menyerap minyak mentah produksi dalam negeri dan secara melawan hukum melakukan impor minyak bumi. Alasan impor adalah produksi minyak mentah dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai tidak memenuhi

Anggota Komisi III  
DPR RI Bambang  
Soesatyo.



FOTO: DOK/VEL

nilai ekonomi. Padahal, harga yang ditawarkan masih masuk rentang harga perkiraan sendiri (HPS).

Dengan cara itu, PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah. Sementara PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang berupa bahan bakar minyak (BBM). Dalam proses itu, diduga terjadi pemufakatan jahat dengan cara pengkondisian pemenangan daftar mitra usaha terseleksi (DMUT) atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi.

Tidak hanya itu, kegiatan impor tersebut berdampak pada tingginya harga jual BBM, sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan subsidi ataupun kompensasi kepada masyarakat. Kerugian negara diperkirakan Rp193,7

“

**Publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka.**

**Bambang Soesatyo**  
Anggota Komisi III DPR RI

triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian



Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.

subsidi pada 2023 sebesar Rp21 triliun.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) mendesak Kejagung mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus mega korupsi Pertamina. Hal ini penting, agar kasus tersebut tidak menjadi bola liar yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoax di masyarakat.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan, setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

"Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoax yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa.

Namun, disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat," katanya.

Bamsuet juga mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka. Apalagi, profil para tersangka sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.

Selain itu, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengaku prihatin atas dugaan korupsi yang mendera Pertamina Patra Niaga serta anak perusahaan Pertamina lainnya. Meitri menilai, skandal ini menyingkap bagaimana rapuhnya manajemen perusahaan tersebut, sehingga dapat disusupi oleh oknum pihak swasta yang tidak bertanggung jawab



FOTO: TARI/VEL

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani.

dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah.

"Saya melihat peraturan yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, memiliki spirit yang positif. Namun, aturan ini menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi dengan praktik pengawasan yang kuat oleh Kementerian ESDM dalam

memastikan pengelolaan sektor energi berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur.

Lemahnya pengawasan ini akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup dan merusak sistem bisnis Pertamina, sehingga berakibat pada kerugian negara," jelas Meitri.

Politisi PKS itu menambahkan, lemahnya pengawasan secara tidak langsung berkontribusi terhadap

moral hazard yang menjangkiti sejumlah oknum petinggi perseroan. Moral hazard tersebut pada akhirnya menciptakan lingkungan, di mana mereka merasa aman untuk melakukan tindakan tidak etis atau ilegal.

Ia kemudian mengingatkan, agar Pertamina lebih hati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, perseroan perlu meninjau kembali sejumlah kontrak kerja sama dengan pihak swasta untuk memastikan bisnis yang berjalan sesuai dengan peraturan.

"Ke depan, Pertamina harus lebih selektif dan berhati-hati dalam menjalin kerja sama agar praktik serupa tidak terulang. Langkah ini bukan untuk mempersulit, tetapi guna memastikan bahwa setiap mitra bisnis memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan tata kelola yang baik dan bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," terangnya. 

“

**Lemahnya pengawasan ini akhirnya membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyusup dan merusak sistem bisnis Pertamina, sehingga berakibat pada kerugian negara**

Meitri Citra Wardani  
Anggota Komisi XII DPR RI

# MEGA SKANDAL KORUPSI PERTAMINA

**Dugaan korupsi telah terjadi  
sejak 2018-2023**



**Kerugian negara mencapai  
Rp193,7 triliun hanya pada  
tahun 2023, dengan rincian:**

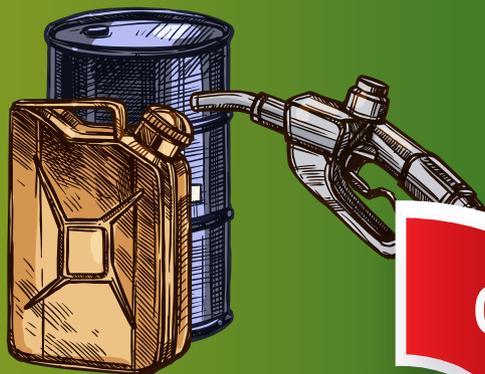
Kerugian Pemberian  
Kompensasi (2023) sekitar  
Rp126 triliun,

Kerugian Pemberian  
Subsidi (2023) sekitar  
Rp21 triliun,

Potensi kerugian  
dari impor minyak  
mentah melalui  
broker sekitar Rp2,7  
triliun,

Potensi kerugian dari impor BBM  
melalui broker Rp9 triliun,

Potensi kerugian  
dari ekspor minyak  
mentah Rp35 triliun



# MODUS OPERANDI



Markup impor minyak mentah dan BBM

Pengoplosan BBM (Ron 90 menjadi Ron 92)

Indikasi Pertamina enggan menyerap minyak bagian KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)

## DAFTAR SEMBILAN TERSANGKA BESERTA PERANNYA:

### Riva Siahaan (RS)

**Direktur Utama**  
PT Pertamina Patra Niaga.

01

### Sani Dinar Saifuddin (SDS)

**Direktur Feedstock and Product Optimization**  
PT Kilang Pertamina Internasional.

02

### Agus Purwono (AP)

**Vice President (VP) Feedstock Management**  
PT Kilang Pertamina International.

03

### Yoki Firnandi (YF)

**Direktur Utama**  
PT Pertamina International Shipping.

04

### Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR)

**Beneficial Owner**  
PT Navigator Katulistiwa

05

### Dimas Werhaspati (DW)

**Komisaris**  
PT Navigator Katulistiwa dan PT Jengjala Maritim

06

### Gading Ramadhan Joedo (GRJ)

**Komisaris**  
PT Jengjala Maritim dan **Direktur Utama**  
PT Orbit Terminal Merak

07

### Maya Kusmaya (MK)

**Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga**  
PT Pertamina Patra Niaga.

08

### Edward Corne (EC)

**VP Trading Operation**  
Pertamina Patra Niaga.

09



Oleh:  
**Anggawira**  
Sekjen HPMI 2022-2025

# Ketahanan dan Infrastruktur Energi Pertamina di Tengah Mega Skandal Korupsi

**Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan energi yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat serta sektor industri.**

Infrastruktur energi yang andal, cadangan penyangga energi yang memadai, dan tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) yang transparan merupakan elemen kunci dalam mencapai ketahanan energi. Namun, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait hal ini, terutama dengan adanya kasus korupsi yang menimpa PT Pertamina (Persero), perusahaan energi milik negara.

“

**Kasus korupsi yang menimpa Pertamina menyoroti urgensi perbaikan tata kelola BBM. Transparansi dalam rantai pasok BBM, mulai dari pengadaan hingga distribusi**

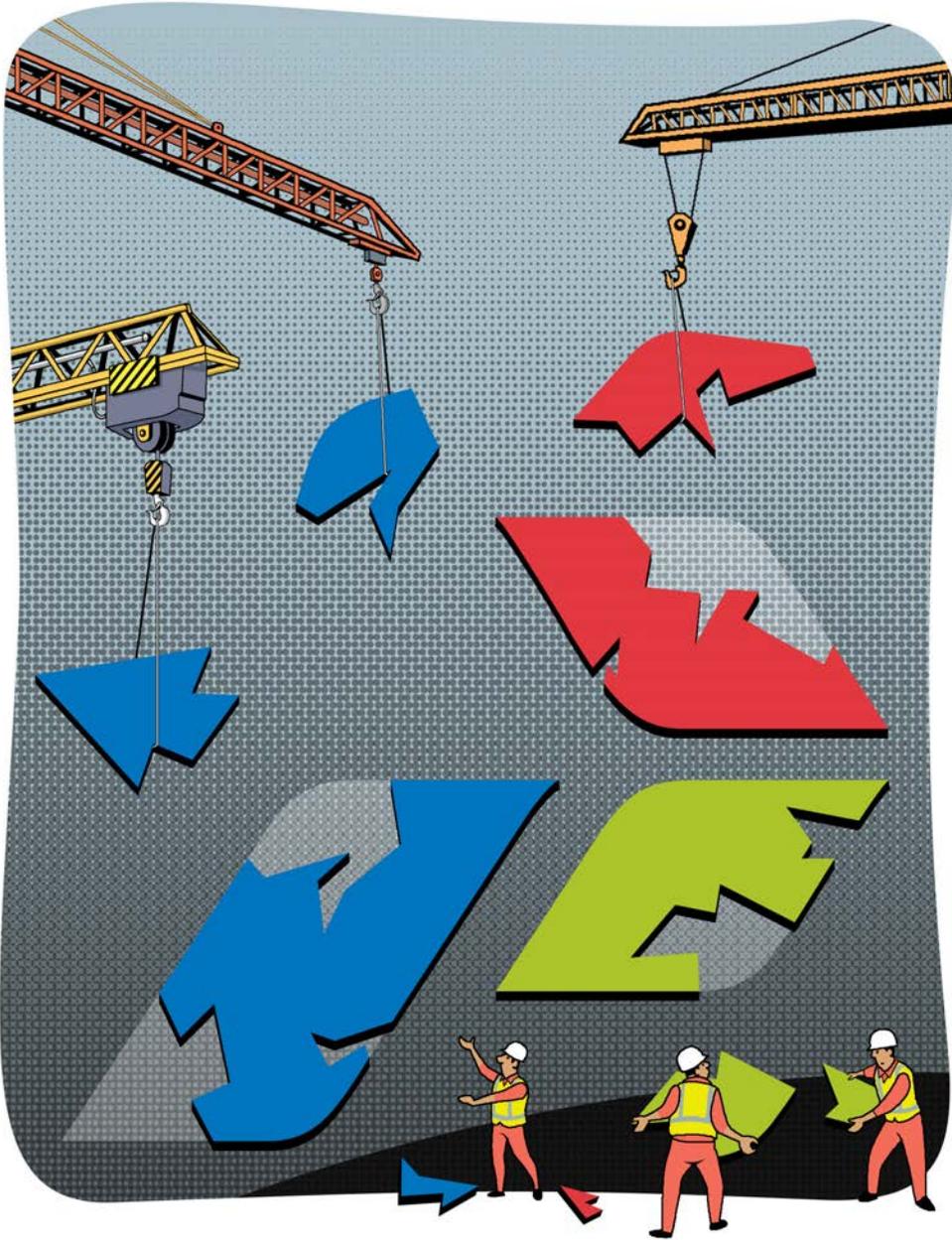
Dalam konteks itu, Pertamina memiliki tantangan terkini, yaitu kasus korupsi di Pertamina. Diketahui, pada Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh individu sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan Pertamina, anak perusahaannya, dan kontraktor swasta. Dugaan korupsi ini terjadi antara 2018 hingga 2023 dan diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun (sekitar US\$12 miliar). Modus operandi yang terungkap antara lain penggelembungan volume impor minyak mentah dan bahan bakar, serta manipulasi harga dengan mencampurkan bensin berkualitas rendah untuk dijual sebagai produk berkualitas lebih tinggi.

Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencoreng reputasi Pertamina sebagai tulang punggung sektor energi nasional. Selain itu, insiden kebakaran di depo bahan bakar Plumpang pada Maret 2023 yang

menewaskan 19 orang menambah daftar tantangan yang dihadapi Pertamina dalam menjaga kepercayaan publik.

Di luar kasus mega skandal itu, Pertamina tetap berperan penting untuk menjadi penyangga cadangan energi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan beberapa kilang minyak dengan total kapasitas 1 juta barel per hari (bph), meningkat dari rencana awal satu kilang berkapasitas 500.000 bph. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat 21 proyek pengolahan sumber daya alam senilai \$40 miliar, yang juga mencakup proyek gasifikasi batubara dan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak berkapasitas 1 juta barel.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak, yang saat ini mencapai sekitar 1 juta bph untuk memenuhi



kebutuhan domestik. Selain itu, fasilitas penyimpanan minyak yang memadai akan berfungsi sebagai cadangan penyangga energi, memastikan stabilitas pasokan dan harga BBM di pasar domestik.

Belajar dari kasus mega skandal itu, tata kelola BBM yang transparan mutlak harus dilaksanakan. Kasus korupsi yang menimpa Pertamina menyoroti urgensi perbaikan tata kelola BBM. Transparansi dalam rantai pasok BBM, mulai dari pengadaan hingga distribusi, harus

ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pertamina telah berkomitmen memperbaiki tata kelola perusahaan dan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk meningkatkan transparansi serta memastikan keamanan energi

Dalam konteks itu, saya menilai perlu dilakukan beberapa strategi ke depan yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya mega skandal korupsi Pertamina. Antara lain, pertama, reformasi tata kelola.

Pertamina perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BBM melalui penerapan teknologi informasi, audit independen, dan pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dan distribusi.

Kedua, Pertamina perlu membenahi pembangunan infrastruktur. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mempercepat pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan cadangan penyangga energi nasional.

Ketiga, Pertamina perlu lebih intensif melakukan diversifikasi energi. Pertamina perlu mengembangkan sumber energi alternatif seperti biofuel, gas alam, dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil.

Keempat, hal yang juga perlu dilakukan adalah Pertamina melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Meningkatkan kompetensi SDM di sektor energi melalui pelatihan dan pendidikan untuk mendukung tata kelola yang lebih baik.

Terakhir, kelima, Pertamina perlu lebih tegas lagi melakukan upaya penegakan hukum. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan pelanggaran lainnya dalam sektor energi untuk memberikan efek jera dan membangun kepercayaan publik.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan ketahanan energi Indonesia dapat terjaga, dan insiden seperti kasus korupsi di Pertamina tidak terulang kembali. Penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mewujudkan sektor energi yang bersih, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 🐾

**M**enyambut hari besar pasti membutuhkan banyak konsumsi. Belanja masyarakat menyambut Idulfitri

juga disambut dengan lonjakan harga. Kondisi demikian secara langsung membuat permintaan pasar terhadap bahan pangan ikut meningkat. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menjadi fenomena yang wajar. Namun yang sangat disayangkan, hampir setiap tahun khususnya di hari raya keagamaan dan hari libur nasional saat permintaan pasar meningkat, selalu diiringi dengan kenaikan harga.

Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, harga akan merangkak naik pada dua pekan sebelum hari raya. Menurut Herman, pasokan bahan pangan seperti beras, minyak dan gula perlu dijaga, agar harga tetap stabil atau tidak melebihi batas psikologis yang wajar.

# Kenaikan Harga Jelang Hari Besar Haruskan Selalu Jadi Fenomena?

**Bulan suci Ramadan yang diakhiri dengan hari raya Idulfitri merupakan momen yang sangat sakral dan membahagiakan bagi umat muslim di seluruh dunia. Khusus di Indonesia, menjadi sebuah kebiasaan turun temurun jika masyarakat menyambut hari besar tersebut dengan menyiapkan menarik khas lebaran.**



Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.

"Karena sebenarnya kita sudah punya undang-undang yang kuat untuk menindak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan secara tidak wajar dari kondisi menjelang hari raya," ujar Hero, begitu Herman Khaeron biasa disapa, dalam sebuah diskusi dialektika di Gedung Nusantara I, DPR RI, akhir Februari silam.

Penting untuk dilakukan monitoring harga dari semua pihak, termasuk oleh masyarakat. Artinya, diharapkan masyarakat dapat memantau atau melaporkan jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Pihaknya pun meyakini akan merespon laporan tersebut, sekaligus memastikan langkah mitigasi untuk menjaga keseimbangan pasar.

Dengan kata lain, Hero menegaskan komitmennya bersama pemerintah untuk terus mengawal ketersediaan pangan dan menjaga harga tetap terjangkau, sehingga

FOTO: FARHAN/VEL



FOTO: DEPIVEL

Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dipimpin Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetyani, saat mengecek kestabilan harga pangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

masyarakat bisa menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan nyaman.

### Tinjauan Langsung ke Pasar

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetyani Aher, memantau harga dan ketersediaan pangan langsung di Pasar Kosambi, Kota Bandung, awal Maret lalu. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, ia ingin memastikan secara langsung, apakah masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga pangan?

Tidak berlebihan jika kemudian politisi dari Fraksi PKS ini berdialog dengan pedagang dan pembeli terkait harga berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, telur, dan sayur-mayur. Ia menemukan beberapa pedagang yang mengeluhkan adanya fluktuasi harga yang dipengaruhi faktor cuaca dan meningkatnya permintaan selama Ramadan.

"Kami akan menyampaikan temuan ini kepada pemerintah



dan pihak terkait, agar ada langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan. Di sini saya mendorong penguatan peran Bulog serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga stabil," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo juga turun langsung berkeliling ke pasar-pasar di Malang, Jawa Timur, seperti Pasar Induk Gadang, Pasar Besar Malang, dan Pasar Bunul, akhir Februari silam. Hal tersebut dilakukannya guna memastikan stabilitas harga bahan

pokok atau sembako tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

Dalam kesempatan itu, ia menemukan gejolak kenaikan harga, terutama pada komoditi cabai hingga bawang merah. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah besar hingga Rp100 ribu dari semula Rp45 ribu per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan putih di angka Rp40 ribu dari sebelumnya Rp30 ribu per kg. Sementara untuk daging sapi dan ayam saat itu tidak ditemukan kenaikan harga. ayu/mh

hal/mh

# Danantara, Langkah Strategis Perkuat Ekosistem Investasi

**Danantara hadir sebagai harapan bagi ekosistem investasi nasional. Tantangannya adalah memastikan harapan itu benar-benar menyejahterakan rakyat.**



Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

**M**enyambut hari besar Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi momentum penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan proyeksi pendanaan awal sebesar Rp320 triliun dari total aset BUMN yang

diperkirakan mencapai Rp14.715 triliun, Danantara digadang-gadang menjadi motor penggerak investasi dan pembangunan nasional. Langkah ini tak hanya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara, tetapi juga menegaskan komitmen dalam memperkuat ekosistem investasi nasional.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, dalam pernyataannya menegaskan bahwa Danantara harus mampu membawa kebermanfaatannya nyata bagi bangsa. "Melalui Danantara, kita berharap dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat," ujarnya. Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, optimistis bahwa Danantara akan memiliki daya saing internasional, setara dengan Khazanah di Malaysia dan Temasek di Singapura.

Pembentukan Danantara tidak terlepas dari revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan ini menegaskan peran strategis Danantara sebagai *sovereign wealth fund* yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset negara melalui investasi yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing serta mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, manufaktur, dan hilirisasi industri.

Optimisme terhadap Danantara juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Ia menilai bahwa Danantara akan menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi nasional sekaligus kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan strategis. "Danantara ini merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen," ungkap Firnando.

## Tantangan Besar

Namun, di balik optimisme tersebut, tantangan besar menanti. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, mengingatkan pentingnya penerapan

prinsip transparansi dan *good corporate governance* dalam setiap langkah investasi yang diambil Danantara. "Setiap investasi yang dilakukan harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Hal ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan," ujarnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid, yang menekankan bahwa pengawasan terhadap Danantara harus diperketat agar tidak mengulang kasus penyalahgunaan dana seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. "Keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada *governance* yang baik, mitigasi risiko investasi, serta koordinasi yang erat antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta," tegasnya.

Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang dikelola, melainkan juga pada efektivitas tata kelola dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan investasi menjadi kunci utama agar



FOTO: FARHAN/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto.



FOTO: FARHAN/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi.



FOTO: DOK/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak.



FOTO: DOK/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid..

Danantara benar-benar mampu membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah, DPR, dan masyarakat harus bersinergi dalam memastikan

bahwa Danantara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak keluar dari jalur kepentingan nasional. **aha/mh**

## DANANTARA KONSOLIDASI INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY (INA) DAN 7 BUMN YAKNI:



PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk  
Rp. 2.174 T



PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk  
Rp. 1.087T



PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk  
Rp. 1.965 T



PT TELKOM INDONESIA  
Rp. 316 T



PT PLN (Persero)  
Rp. 1.671 T



MINING INDUSTRI INDONESIA (MIND ID)  
Rp. 259 T



PT PERTAMINA  
Rp. 1.412 T



INVESTMENT AUTHORITY (INA)  
Rp. 163 T

### TARGET DANANTARA:

- Jadi Sovereign Wealth Fund (SWF) Keempat Terbesar Dunia
- Mengelola Kekayaan Pemerintah Di Bumh
- Investasi Di Proyek Berdampak Besar Seperti Energi Terbarukan, Hilirisasi Industri Dan Pangan

**"Danantara Akan Jadi Katalisator Sektor-Sektor Unggulan, Termasuk Energi Hijau Dan Industri Berbasis Teknologi Tinggi."**

(Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian)



# Revisi UU PPMI

## Mengangkat Martabat Pejuang Devisa



Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

**Berawal dari perubahan nomenklatur Kementerian Ketenagakerjaan menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyusun RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).**

**M**embuka perspektif baru demi memperbaharui regulasi yang usang, negara ingin hadir memberikan kepastian hukum untuk pekerja migran Indonesia. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya penyusunan

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). Dirinya menyoroti tiga masalah yang harus dijawab dalam RUU PPMI.

"Saya mau menegaskan dan mengajak kita semua tentang penyusunan RUU Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia ini. Saya kira secara filosofis setidaknya ada tiga masalah yang harus kita jawab dalam undang-undang ini," ujar Doli.

Masalah pertama yang disorotnya adalah perlindungan terhadap PMI. Berdasarkan laporan yang ia terima, banyak PMI mengalami perlakuan sewenang-wenang di negara mereka bekerja. Oleh karena itu, tegasnya, regulasi ini harus memastikan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terulang di masa mendatang.

"Yang pertama adalah soal perlindungan. Makanya, judulnya adalah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena banyak sekali selama ini kita mendengar bahwa para pekerja migran kita itu diperlakukan sewenang-wenang di negara tempat mereka bekerja. Oleh

karena itu undang-undang ini harus bisa menjawab, tidak boleh lagi ada kejadian yang seperti itu," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Masalah kedua adalah potensi ekonomi yang dihasilkan oleh PMI. Sebagaimana yang telah diketahui, PMI bagi negara, merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Namun, ia menilai masih banyak potensi keuangan negara yang hilang akibat adanya praktik ilegal dalam penyaluran tenaga kerja migran.

"Oleh karena itu, menurut saya, memang harus diatur sedemikian rupa supaya tidak lagi ada yang ilegal, artinya tidak lagi ada sumber atau potensi keuangan negara yang menguap, yang harusnya masuk ke negara tapi entah ke mana-mana gitu. Karena dilaksanakan secara ilegal atau namanya sekarang nonprosedural," katanya.

Selanjutnya, masalah ketiga yang dibahas dalam RUU ini adalah tanggung jawab negara terhadap pekerja migran, termasuk pascapekerja migran kembali ke tanah air. Doli menilai bahwa ini merupakan langkah progresif dalam kebijakan perlindungan PMI.

Di sisi lain, dirinya mengatakan, RUU PPMI akan mengatur profesi dengan keahlian tertentu dari WNI yang bekerja di luar negeri. Ia menegaskan tidak ingin PMI diidentikkan dengan profesi berketerampilan rendah (low skill).

"Artinya, kita juga jangan terjebak. Selama ini, kan, seolah-olah pekerja yang kita kirim itu adalah pekerja yang low skill. Ini undang-undang harus bisa kita jaga martabat dan muruah bangsa dan negara kita gitu. Nah, kita juga sudah mulai berpikir untuk mengirimkan pekerja-pekerja yang high level skill-nya gitu," ujar Doli.

Ia menerangkan, Baleg DPR RI kini tengah membahas kompetensi PMI. Satu di antara kompetensi tersebut berupa kompetensi komunikasi yang

baik dari segi bahasa hingga tata sikap. "Nah, yang kedua juga adalah masalah bahasa ya. Bagaimana supaya orang-orang yang kita kirim di tujuannya itu, tidak kesulitan melakukan komunikasi, dan termasuk yang ketiga adalah attitude ya," terangnya.

Menindaklanjuti sorotan tersebut, Baleg DPR RI telah menggelar rapat presentasi tim ahli terkait penyusunan RUU Perubahan Ketiga atas UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Januari silam. Dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan, ada 10 isu strategis dalam PPMI.

migran Indonesia dengan menambah peserta magang. Keenam, distribusi informasi peluang kerja luar negeri oleh P3MI bekerja sama dengan kementerian kemudian LTSA, UPT, Pemda, dan desa. Ketujuh, penguatan perlindungan sebelum bekerja.

Kedelapan, penguatan perlindungan selama bekerja. Kesembilan, penguatan perlindungan setelah bekerja. Dan kesepuluh, penguatan kepesertaan jaminan sosial. Pada kesempatan yang sama, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, meminta seluruh pihak, termasuk serikat pekerja, tenaga ahli, dan anggota Baleg DPR RI, untuk fokus



Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Di antaranya, pertama, penyesuaian kelembagaan atau nomenklatur dari badan menjadi kementerian. Kedua, penambahan pengaturan fungsi promosi dan pemanfaatan peluang kerja terkait dengan pemasaran. Ketiga, penyesuaian nomenklatur atas tenaga kerja berubah menjadi kantor perlindungan pekerja migran Indonesia.

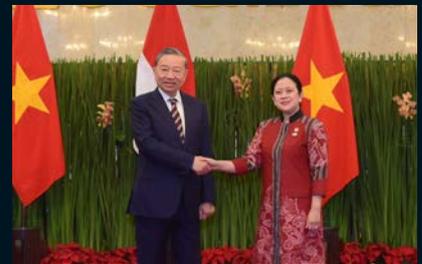
Lalu, keempat, penyesuaian istilah menjadi awak kapal perikanan migran dan awak kapal niaga migran. Kelima, perluasan cakupan pekerja

membahas perlindungan bagi pekerja migran, baik yang berstatus legal maupun ilegal.

"Regulasi ini harus berbasis kemanusiaan. Kemanusiaan harus terlindungi, dan pekerja migran harus mendapat status legal," ungkap Bob. Ia menambahkan, "Dengan adanya perhatian khusus ini, kita berharap regulasi yang disusun dapat semakin memperkuat perlindungan bagi pekerja migran. Undang-undang yang ada harus mampu mengangkat martabat para pejuang devisa kita," tandasnya. — um/mh



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima kunjungan kehormatan H.E. Mr. To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Pada pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan di sektor ekonomi, perdagangan, hubungan antar parlemen hingga hubungan dengan masyarakat. Foto: Oji, Jaka dan Farhan/Andri



Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di dampingi pimpinan dan Anggota komisi VI DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta, untuk memantau harga dan takaran produk minyak goreng merek Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Foto : Yoga/Andri





Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau bencana banjir yang kerap melanda ke Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/03/2025). Cucun memastikan semua pemangku kepentingan, khususnya mitra DPR seperti BNPB, segera mengambil tindakan nyata untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Foto : Upi/Andri



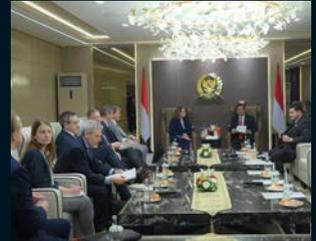
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad melakukan sidak langsung ke Stasiun Pasar Senen bersama jajaran Komisi VI DPR RI serta perwakilan KAI di Jakarta Pusat, Jakarta, Senin Sore (17/3/2025). Dasco mengapresiasi pelayanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Foto : Farhan/Andri



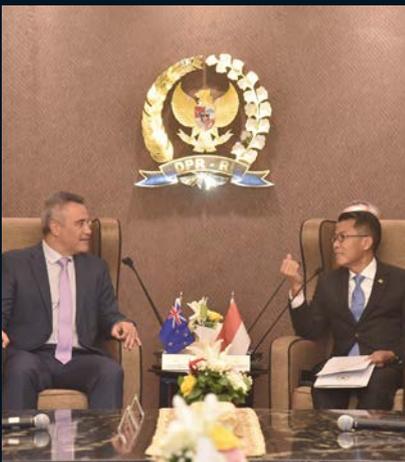
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat meninjau lokasi banjir di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025). Foto: Kresno/Andri



Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat menerima kunjungan dari Counselor for Political Affairs Amerika Serikat, David V. Muehlke, dan Reva Price dari U.S.-China Economic and Security Review Commission di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).  
Foto: Mentari/Andri



Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga yang diwakili Wakil Menteri Taufik Hidayat dan dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Tohir di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Foto: Tari/Andri



Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun di dampingi Wakil Ketua Komisi XI beserta Anggota Komisi XI DPR saat menerima kunjungan Duta Besar New Zealand untuk Indonesia, Philip Taula, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Foto: Azka/Andri

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, beserta tim, saat sidak ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di pasaran, khususnya terkait dengan RON 92 dan RON 90.

Foto: Runi/Andri



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi I dan perwakilan delapan fraksi saat menggelar konferensi pers terkait revisi UU TNI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). konferensi pers untuk menjelaskan dinamika terbaru mengenai Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Foto: Arief/Andri



Biro Pemberitaan Parlemen menggelar acara "Ramadan Ngantor", yang berlangsung di Gedung Nusantara 4 (Pustakaloka), Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum istimewa bagi umat Muslim untuk meningkatkan ibadah sekaligus mempererat kebersamaan.

Foto : Jaka dan Farhan/Andri





**AQIB ARDIANSYAH**

**POLITISI MUDA  
MENGABDI UNTUK RAKYAT**

Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, 1980. Sebuah desa di selatan Jawa, di bawah lereng Gunung Slamet, tampak indah menawan. Masyarakatnya bergantung pada dunia pertanian. Areal persawahan hijau menghampar menghiasi lanskap desa. Hasil perkebunan juga melimpah di sini.

Syahdan, keluarga sederhana dan religius hidup di desa ini. Dan sepasang insan sedang menanti kelahiran anak keduanya. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 7 Oktober 1980. Tangis bayi laki-laki seketika memecah ketegangan di sebuah rumah sederhana. Belum banyak klinik persalinan di desa itu. Jadi, biasanya bidan persalinan yang mendatangi rumah.

Kedua orangtuanya kemudian memberi nama anak keduanya ini Aqib Ardiansyah. Bahagia terpancar dari wajah ayah dan ibu sang bayi. Sang ayah Muhammad Amin Djafar adalah pedagang klontong yang membuka warung kecil-kecilan. Dan ibundanya Anisah, seorang wanita bersahaja yang mandiri dan sangat perhatian pada anak-anaknya. Aqib kecil pun hidup di tengah keluarga sederhana dan religius ini. Rumahnya ketika itu masih berlantaikan tanah.

Setelah kelahiran Aqib, masih ada enam adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Aqib adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Sibuk berdagang untuk menghidupi keluarga, ayahnya tak banyak memperhatikan anak-anaknya. Sang ibulah yang berperan memberi perhatian penuh pada anak-anaknya. Bahkan, Aqib kecil merasakan kedekatan ibunya daripada ayahnya.

Aqib kecil senang bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya di kampung. Bermain bola, kelereng, layang-layang, dan permainan tradisional sunda manda (taplak), jadi favoritnya. Di kampungnya masih ada sungai yang sangat jernih. Di situlah ia suka mandi. Bahkan, sewa ban untuk bisa berenang dan berarum jeram bersama para sahabat kecilnya. Wah, senangnya mengingat masa kecil di kampung.

Memulai pendidikan formalnya, Aqib bersekolah di TK Islam Ta'allumul Huda, Bumiayu. Masa TK, ia masih suka bermalas-malasan ke

sekolah. Ia hanya ingin bermain. Kadang ia harus dipaksa untuk ke sekolah. Setelah TK, Aqib lalu bersekolah di SD Islam Ta'allumul Huda, Bumiayu. Setiap hari ia berjalan kaki ke sekolah bersama sahabat-sahabat kecilnya. Jaraknya sekitar setengah kilometer. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sangat disuka.

Sementara itu, hobi bolanya tak tertahankan. Ia suka sekali bermain bola di kampungnya. Tak ada lapangan, halaman rumah pun jadi arena bermain bola. Posisi penyerang sangat disukainya saat bermain bola. Aqib kecil, memang "gila" bola. Pertandingan sepak bola di kampungnya selalu ia ikuti. Bahkan, ia sempat mengikuti pelatihan di sekolah sepak bola *Hisbul Wathon* milik Muhammadiyah di kampungnya.

Syahdan, ketika Aqib baru duduk di kelas 4 SD, ibunya tercintanya wafat. Aqib merasa kehilangan, karena sehari-hari ia lebih banyak dengan ibunya. Ayahnya kemudian mengambil kendali pengasuhan sekaligus pencari nafkah untuk keluarga. Sedari kecil, ayahnya suka menanamkan kemandirian hidup pada anak-anaknya. Dan nasihat orangtuanya yang terus diingat Aqib adalah hidup harus bermanfaat, apapun profesinya kelak.

Setamat SD tahun 1992, Aqib melanjutkan ke SMP Islam Ta'allumul Huda, Bumiayu. Ia tetap berjalan kaki ke sekolah. Di SMP inilah, ia mulai gemar berorganisasi. Aqib dipercaya menjadi bendahara OSIS. Saat libur sekolah tiba, Aqib suka mengikuti program pesantren kilat di Banyumas. Sejak mengikuti



Aqib Ardiansyah (paling kanan) bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan para anggota DPR lainnya, sesaat sebelum mengikuti Rapat Pimpinan.



Aqib Ardiansyah saat mengikuti rapat di Komisi XII DPR RI.

kajian agama inilah, ia jadi tertarik mendalami ilmu agama.

## Panggung Politik

Lulus SMP tahun 1996, Aqib betul-betul ingin mendalami studi Islam. Ia kemudian menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Di pesantren itu ada madrasah aliyah negeri (MAN) yang bisa diikuti Aqib. Masuk pesantren betul-betul keinginannya sendiri. Diantar sang

## PROFIL

ayah ke Jombang, jadilah Aqib santri pondok pesantren.

Hidup di pesantren penuh keprihatinan. Tidur pun harus di lantai tanpa alas. Sajian makannya semur tahu yang dikenal juga dengan "sayur pramuka". Kedisiplinan hidup ditanamkan di pesantren ini. Pukul 03 pagi sudah bangun. Pagi itu, selepas salat subuh mengaji kitab kuning. Tepat pukul 06 pagi, ia harus berangkat ke MAN, sekolah formal yang dijalaninya selama nyantri di Jombang.

Pulang sekolah, ia langsung berkegiatan pesantren, seperti belajar ilmu fiqih, *nahwu shorof*, tajwid, dan lain-lain. Begitu rutinitas menuntut ilmu di pesantren selama tiga tahun. Di pesantren itu, Aqib sangat dekat dengan pengasuhnya. Ia biasa menyapanya Bu Nyai. Namanya, Mundjidah Wahab, putri K.H. Abdul Wahab Hasbullah sang pendiri pesantren. Mundjidah Wahab juga pernah menjadi Bupati Jombang periode 2018-2023.

Bersama Udin, sahabatnya, Aqib sudah seperti abdi dalem di pesantren itu. Ia suka bersih-bersih asrama, baik asrama putri maupun putra. Begitulah kesehariannya nyantri di Tambakberas. Pelajaran hadis salah satu yang disukai Aqib. Pengajarnya K.H. Abdul Kohar. Dia mengajar Kitab Riyadusholihin (kitab kumpulan hadis). Sang kiai sangat sederhana dan religius. Hidup kesehariannya, selalu mengikuti anjuran nabi.

Tahun 1999, Aqib melanjutkan studi ke Fakultas Tarbiyah (pendidikan agama Islam) di Universitas Islam Malang. Sebetulnya ia ingin mendalami bahasa Arab di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, tapi tidak diterima. Akhirnya mendaftar ke UNISMA. Mata kuliah filsafat sangat disukanya, kali pertama menjadi mahasiswa di Malang. Karena menyukai filsafat, ia kerap mengunjungi toko buku bernama Togamas di Malang untuk mencari buku-buku filsafat.



1. Aqib menyerahkan pandangan fraksinya kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. 2. Bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 3. Menghadiri acara buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto.

Filsafat yang disukainya mulai dari era klasik, abad pertengahan, modern, hingga *post modern*. Tokoh filosof yang digandrunginya Plato dan Aristoteles. Plato, katanya, mengajarkan tentang bagaimana menghubungkan antara ide dan wahyu yang menjadi nilai-nilai kehidupan. Sementara Aristoteles memperkuat ide, pikiran, dan gagasan.

Kapasitas intelektual Aqib terus tercerahkan di kampus ini. Tahun 2000, ia dipercaya menjadi Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisma. Bahkan, ia kemudian dipercaya pula sebagai Ketua

Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di luar kampus, Aqib juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjadi ketuanya. Sebagai aktivis kampung, ia aktif berdiskusi, membincang isu-isu agama, demokrasi, dan sosial kemasyarakatan.

"Di UNISMA ada mentor saya, namanya Nuruddin, dia itu putra Usman Mansyur pendiri UNISMA. Beliau mentor saya untuk mengasah kepekaan sosial dan empati sampai saat ini," ungkapnya, mengenang masa kuliah. Lulus kuliah tahun 2006, agak telat dari yang direncanakan, karena ia sibuk memberikan



1



2



3

1. Aqib saat berada di tangan-tengah masyarakat dalam giat dapil. 2. Berfoto bersama mantan Presiden Joko Widodo. 3. Bersama keluarga tercinta.

pendampingan dan advokasi bagi entitas petani dalam menghadapi konflik agraria di Malang. Setelah kuliah itu, ia mulai banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik nasional.

Pergaulannya yang sangat luas dengan para intelektual muda kampus dan masyarakat, mengantarnya ke panggung politik. Ia ingin berkiprah lebih jauh di jantung kebijakan publik. Bila selama ini ia membantu masyarakat lewat lembaga swadaya masyarakat, maka untuk lebih luas, Aqib harus menetapkan dirinya menjadi pejabat negara yang ikut merumuskan berbagai kebijakan populis bagi rakyat.

Kuncinya, ia harus masuk partai politik. "Kebetulan saya dekat dengan PAN, maka saya masuk PAN.

Dari situ, saya bisa tukar pikiran di dunia politik supaya ada warna," akunya. Teguh Juwarno yang waktu itu Ketua Komisi VI DPR RI mengajaknya ke panggung politik. Aqib diminta membantu program kemasayakatan di dapilnya, Brebes dan Tegal. Tahun 2014-2019, Aqib menjadi tenaga ahli (TA) di DPR

RI. pergaulannya kian luas dan dekat dengan para elit politik di PAN.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memintanya mempelajari bidang energi. Lalu ia pun menjadi TA di Komisi VII DPR (2019-2024) yang ketika itu masih membidangi energi. Singkat cerita, memasuki Pemilu 2024, ia diperintahkan Ketua Umum PAN menjadi caleg PAN dan ditempatkan di dapil Jawa Tengah VII (Kab. Pabalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen). Ia pun terpilih dengan meraup suara 64.934 dan berada di posisi 3 dari 7 kursi yang tersedia untuk DPR RI.

"Perasaan senang, haru pasti ada. Saya ini kemarin bukan siapa-siapa. Orang banyak underestimate, orang banyak enggak percaya,

orang banyak enggak nyangka, memandang sebelah mata, kalau seorang Aqib yang hanya mempunyai jabatan TA di Komisi VII bisa terpilih menjadi anggota dewan," imbuhnya, penuh senyum.

Setelah resmi terpilih menjadi wakil rakyat di Senayan, mantan Sekretaris PAN Brebes ini, ditempatkan di Komisi XII yang membidangi energi. Begitulah perjuangan Aqib dari bawah hingga menjadi legislator di parlemen. Ia ingin betul-betul mengabdikan untuk masyarakat luas, terutama konstituen yang diwakilinya.

### Bahagia Bersama Keluarga

Menjadi anggota DPR RI mulai menyita waktunya. Namun, saat di rumah, ia tetaplah seorang suami dan ayah. Di rumahnya ada Hani Anisha istri tercinta yang dinikahinya tahun 2010. Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai tiga anak, masing-masing Bintang Putra Peradaban, Bening Citra El Nadine, dan Bintari Sada Sena. Bila ada waktu luang, Aqib mengajak keluarganya berwisata alam.

Bicara hobi, Aqib senang renang. Kebetulan di rumahnya juga ada kolam renang yang bisa dimanfaatkan untuk relaksasi, selain untuk berolahraga. Ditanya soal makanan favorit, ia menyukai soto ayam dan pecel. Di kampungnya sendiri, Bumiayu, ada kuliner yang ia suka, yaitu nasi sogol dan adep-adep. Sebetulnya dua menu ini biasa disajikan saat ada acara pernikahan. Nasi sogol dan adep-adep hanya berisi bumbu kelapa dan sayuran.

Soal lagu, wah, Aqib suka mendengarkan lagu-lagu bergenre pop-rock. Lagu dari Dewa 19, misalnya, sangat disukai. Tak hanya itu, lagu-lagu klasik dari Metalika juga suka. Bila ada waktu luang, ia suka mendengarkannya sendiri di rumah. **rnm/mh**



FOTO: ANJU/VEL

Anggota Komisi I DPR RI, Machfud Arifin, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

# Mengawasi TNI dengan Revisi UU TNI

**Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang intens dilakukan Komisi I DPR RI. Salah satu isu penting adalah TNI tak boleh terlalu jauh masuk ke lini kerja sipil. Sosialisasi revisi ini pun dilakukan ke beberapa daerah.**

**M** Revisi yang masih dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI)

selalu mendapat sorotan. Soal jabatan sipil bagi anggota TNI aktif, memang, mendapat perhatian khusus. Anggota Komisi I DPR RI Machfud Arifin, menegaskan bahwa pembahasan

RUU ini belum final dan masih dalam tahap diskusi.

"Yang kita perlu antisipasi adalah substansi yang lain yang menjadi sorotan masyarakat luas, yaitu tentang keberadaan TNI yang tidak terlalu masuk pada semua lini kegiatan civil society," ujar Machfud kepada Parleментарia usai mengikuti kunjungan kerja ke Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/3/2025) lalu.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini mengatakan bahwa revisi ini harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan batasan dalam ranah sipil. Masyarakat luas juga diharapkan berpartisipasi memberi masukan terhadap revisi RUU tersebut. "Ada pembatasan seperti di UU sebelumnya. Tetapi mau ditambahkan, silakan boleh saja. Tetapi tergantung dalam putusan, dalam undang-undang yang akan diputuskan nantinya," tambahnya.

Politisi Partai NasDem ini berharap, DPR dapat menerima masukan publik, sebelum mengesahkan RUU tersebut. Sehingga, keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil pembahasan yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip demokrasi. "Hal ini masih dalam pembahasan. Itu belum final. Tetapi kita juga harus mendengar aspirasi masyarakat secara luas," tutupnya.

## Blank Spot

Sementara itu, kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah membahas isu blank spot (wilayah tanpa akses internet) di Kalteng yang masih menjadi tantangan besar. Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang, menerangkan, saat ini ada 316 titik blank spot yang tersebar di berbagai kabupaten dan desa di provinsi tersebut.

"Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, Kalteng menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur telekomunikasi. Saya sudah sering

menyuarakan persoalan ini dan berkoordinasi dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital)," ujar Andina saat ditemui Parlemenaria di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalteng, Rabu (5/3/2025) lalu.

Menurutnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah memberikan perhatian khusus terhadap isu tersebut dan sudah mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian dengan jajaran terkait. Namun, jelasnya, realisasi solusi tidak bisa dilakukan secara instan, karena ada faktor efisiensi dan keterbatasan sumber daya. "Proses penyelesaian akan dilakukan bertahap dalam satu tahun pertama ini," imbuhnya.

Perlu diketahui, salah satu kendala utama dalam mengatasi blank spot di Kalteng adalah kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau. Selain itu, beberapa menara BTS yang sudah ada mengalami kerusakan, sehingga tidak berfungsi maksimal.

Politisi Fraksi NasDem itu mengaku, akan terus mengawal permasalahan ini dengan

memberikan data terbaru kepada Komdigi. "Saya selalu menyuarakan (kepada Komdigi) dan mengoordinasikan data yang kami peroleh agar penyelesaian bisa tepat sasaran. Kami menyampaikan (kepada Komdigi) di kabupaten mana dan desa mana yang menjadi prioritas utama," jelasnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada realisasi penuh, ia menyampaikan beberapa titik telah masuk dalam rencana penyelesaian dalam waktu dekat. "Sebentar lagi, mudah-mudahan ada beberapa titik yang bisa diselesaikan," kata Andina.

Menutup pernyataannya, masalah blank spot di Kalteng bukan sekadar soal akses internet, tetapi juga menyangkut pemerataan informasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi digital. Akses yang terbatas menghambat perkembangan daerah, terutama bagi masyarakat di pelosok yang sangat bergantung pada teknologi untuk berbagai kebutuhan, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan daring. — aas,um/mh



FOTO: SAJIM/VEL

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, saat mengikuti kunjungan kerja di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

# Membahas Reforma Agraria dan Transfer Daerah

**Komisi II DPR RI selalu aktif mengawasi perkembangan reforma agraria dan isu dana transfer daerah yang memang menjadi wilayah pembahasan komisi ini. pada kunjungan kerja kali ini, persoalan PPPK juga jadi sorotan saat berkunjung berbagai daerah.**

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, menegaskan bahwa reforma agraria harus menjamin pemerataan fungsi sosial tanah bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat harus memiliki kepastian hukum atas kepemilikan tanah, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik.

"Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN akan segera mengembangkan aplikasi

digital untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tanah rakyat. Kami ingin memastikan bahwa proses sertifikasi ini berjalan secepat mungkin," tegasnya saat kunjungan kerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Kamis (6/3/2025) lalu.

Aria menambahkan, saat ini target percepatan sertifikasi tanah sudah mencapai 85 persen. "Tinggal 15 persen lagi yang harus diselesaikan hingga tahun 2028. Setelah itu, proses akan berlanjut pada penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)," ujarnya.

## Transfer Daerah

Di Jawa Barat, Komisi II melakukan kunjungan melihat persoalan dana transfer keuangan dari pusat ke daerah. Pasalnya, setelah pemerintah melakukan transfer daerah dalam bentuk DAK, DAU, dan lain sebagainya tidak ada pengawasan yang memadai.

"Ketika dana tersebut sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah dan DPRD tanpa ada pengawasan yang memadai," ujar Dede Yusuf kepada Parlemenaria di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025) lalu.

Contoh yang paling mendasar, lanjut Dede, adalah DAK untuk pendidikan. Diketahui, masih banyak sekolah yang rusak, sehingga akhirnya sekolah-sekolah itu mengajukan kembali anggaran ke pemerintah pusat. Misalnya, Kemendikbud, untuk membantu ataupun juga unit sekolah baru, dan lain-lain. "Padahal, alokasi anggarannya sudah banyak diturunkan. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi, apa sih sebetulnya alokasi anggaran tersebut?" tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti kondisi keuangan Jawa Barat yang dinilai masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat memimpin kunjungan kerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi.

FOTO: DIPA/VEL



FOTO: GALUH/VEL

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat foto bersama usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II ke Bandung.

ekspektasi pembangunan daerah. Ia menyinggung laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa alokasi hibah di Jawa Barat mencapai Rp5 triliun, sedangkan anggaran infrastruktur hanya Rp1,2 triliun.

## Pembiayaan PPPK

Di Semarang, Jawa Tengah, Komisi II menggelar pertemuan dengan Pemda dari 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Anggota Komisi II DPR M. Giri Ramanda N. Kiemas, menyampaikan bahwa anggaran belanja pegawai, rata-rata sudah di atas 30 persen, bahkan ada yang sudah hampir mencapai 50 persen.

Hal tersebut, menyebabkan pemerintah kabupaten/kota mengalami kesulitan saat harus mengajukan formasi baru ataupun untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai persyaratan yang telah ditentukan pemerintah.

"Ini menjadi kendala, bahwa tidak bisa semua yang terdaftar di pangkalan data dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK penuh waktu. Sehingga,

tetap ada PPPK paruh waktu. Karenanya, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemda untuk membiayai PPPK, agar tidak membebani keuangan kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah," papar Giri di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (06/03/2025) lalu.

Komisi II bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN, dalam menunggu pengangkatan PPPK, pembiayaan tenaga kerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui APBD tetap dijalankan. — [dip.gal,ica/mh](mailto:dip.gal,ica/mh)



FOTO: ICA/VEL

Anggota Komisi II DPR, M. Giri Ramanda N. Kiemas, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II ke Semarang.

# Melihat Problematika Hukum di Lampung

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, delegasi Komisi III DPR RI ingin melihat dari dekat bagaimana problematika penegakan hukum di provinsi tersebut. Penegakan hukum di daerah ini penting dibahas, agar layanan publik juga berjalan baik.



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Lampung

**K**etua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, institusi penegak hukum kerap menjadi sorotan publik. Karena itu, pihaknya terus memantau implementasi reformasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem di setiap institusi penegakan hukum di Tanah Air, tak terkecuali Provinsi Lampung.

"Kami menyerap aspirasi

berkaitan apa saja yang terjadi dengan problematika terhadap penegakan hukum di Polda Lampung dan Kejati Lampung," ucapnya saat memberi keterangan Pers usai memimpin kunjungan kerja dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Provinsi Lampung, Jumat (21/2/2025) silam.

Komisi III DPR RI memberi perhatian serius terkait komitmen

dan kinerja sistem penegakan hukum dan peradilan untuk memberikan kepuasan layanan publik dan mencapai citra positif dibutuhkan implementasi dan peningkatan responsivitas, profesionalisme, dan transparansi dari institusi penegak hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Tidak boleh ada lagi kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

## Penanganan Narkotika

Di Pekanbaru, Riau, delegasi Komisi III DPR membincang penanganan narkotika. Polda Riau mendapat apresiasi atas penegakan hukum soal ini. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi kinerja Kapolda Riau dan jajarannya dalam menangani kasus narkotika, termasuk baru-baru ini aksi dramatis kejar-kejaran yang berhasil menggagalkan penyelundupan barang haram tersebut.

"Saya melihat sendiri video kejar-kejaran seperti film James Bond itu, dan saya memberikan respek yang tinggi kepada Kapolda Riau beserta seluruh jajarannya, terutama Ditresnarkoba," ujar Hinca di Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025) lalu. Pemberantasan narkotika tidak



Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III ke Pekanbaru, Riau.

cukup hanya dengan menangkap pelaku di lapangan. Ia menekankan penting pencegahan di hulu agar barang haram tersebut tidak masuk ke wilayah Indonesia, terutama melalui jalur perbatasan laut.

Legislator Fraksi Demokrat ini meminta aparat kepolisian bekerja sama lebih erat dengan Bea Cukai dan instansi terkait, agar pengawasan di perbatasan semakin diperketat. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga menjadi kunci dalam mencegah masuknya narkoba ke Indonesia.

"Harus ada kerja sama yang solid dengan Bea Cukai dan instansi lainnya. Ini harus dijaga dengan ketat. Jangan hanya fokus di hilir dengan menangkap pengedar, tetapi cegah dari hulunya agar narkoba tidak masuk," tegasnya.

### Pengawasan Impor Ilegal

Menjelang bulan Ramadan lalu, Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepolisian dan kejaksaan memberikan perhatian

penuh terhadap peredaran barang-barang impor, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, yang diperkirakan akan meningkat.

"Pihak berwenang agar lebih

berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara," tegasnya di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat (21/02/2025) silam.

Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan banyak barang impor yang seharusnya masuk melalui jalur resmi, tetapi ada dugaan kuat sejumlah barang tersebut berasal dari impor ilegal. Hal ini, selain merugikan pelaku usaha lokal, juga mengurangi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan dari proses impor yang sah.

"Dengan demikian saya harapkan, kepolisian, kejaksaan, dan Bea Cukai bisa memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur impor, terutama yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal sangat penting, mengingat dampak buruknya terhadap perekonomian, terutama bagi para petani dan pengusaha lokal yang terkena dampak persaingan tidak sehat," jelasnya. [srw/upi/mh](#)



Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

# Sidak Pasar, Pantau harga Pangan

**Jelang dan selama Ramadan 2025 lalu, Komisi IV DPR RI proaktif memantau ke sejumlah pasar di daerah. Inspeksi mendadak (sidak) pun digelar untuk mengawasi kenaikan harga pangan di sejumlah daerah.**

**M**enjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar cenderung mengalami kenaikan, terutama pada sektor daging dan cabai. Untuk memastikan stabilitas harga serta kelayakan bahan pokok yang dijual, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengunjungi

Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (19/2/2025) lalu.

"Alhamdulillah, harga bahan pokok masih stabil, termasuk daging dan sayuran. Selain itu, untuk memastikan bahan pangan yang dijual layak konsumsi atau tidak, di Pasar Johar sudah terdapat posko Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bertugas memantau stabilisasi

harga serta menguji bahan pangan dari kemungkinan penggunaan zat kimia berbahaya," ujar Yohan usai meninjau Pasar Johar.

Legislator Dapil NTT I ini berharap stok bahan pokok di seluruh pasar tetap terjaga agar harga tidak melonjak. "Mudah-mudahan stok selalu stabil sehingga harga juga terkendali. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalani bulan Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kelangkaan bahan pokok atau kenaikan harga yang tidak terkendali," katanya.

Yohan juga menekankan pentingnya peran pasar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat serta menyediakan kebutuhan dengan harga yang wajar dan kualitas yang aman dikonsumsi. Ia menegaskan tidak ingin lagi mendengar ada bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya.

"Pasar harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok. Jangan sampai lagi kita mendengar



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, saat meninjau stabilitas harga pangan di Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah.

FOTO: AZKAV/VEL



FOTO: NADYA/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, saat mengecek ketersediaan bahan pokok jelang puasa ke Pasar Gedhe Hardjonagoro, Surakarta (Solo).

ada ayam yang diawetkan dengan formalin, daging yang diformalin, atau buah dan sayur yang disuntik zat kimia. Kami bersyukur Bapanas memiliki posko di sini untuk memastikan semua barang segar dan layak dikonsumsi. Mudah-mudahan pemerintah terus menjaga dan mendorong ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sehingga kita semua dapat menyambut Ramadan dan Idulfitri dengan penuh kebahagiaan," tutup anggota Fraksi PAN tersebut.

### Kelangkaan Santan

Di Surakarta, Jawa Tengah, delegasi Komisi IV DPR RI juga memantau pasar tradisional. Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi, menyoroti kelangkaan santan kemasan di pasaran. Ia menilai kondisi ini terjadi karena perdagangan kelapa dikuasai oleh sejumlah pengusaha tertentu, sehingga peredaran olahan kelapa di masyarakat menjadi

terbatas.

"Di daerah pemilihan saya, masyarakat melaporkan bahwa terjadi perebutan kelapa. Padahal, produksi kelapa kita banyak. Namun, kelapa dalam bentuk gelondongan langsung dikirim ke Jakarta. Mungkin di sana kelapa ini dipilah-pilah lagi, mulai dari sabut, batok, hingga daging kelapanya, yang katanya juga memenuhi permintaan dari luar negeri," ujarnya kepada Parlemenaria di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025) silam.

Ria, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa indikasi kelangkaan olahan kelapa sudah terlihat, salah satunya dengan hilangnya santan kemasan bermerk KARA di pasaran. Jika pun tersedia, harganya melonjak hampir dua kali lipat dari biasanya.

"Saat ini masih ada merek SUN, tapi santan KARA yang biasa digunakan masyarakat justru hilang. Ini harus menjadi perhatian

pemerintah. Siapa eksportir kelapa yang mendominasi? Jangan sampai semua kelapa dari Indonesia dibawa keluar, seperti kasus minyak goreng sebelumnya. Padahal, bahan baku ada, tetapi tidak tersedia di dalam negeri," tegasnya.

Menurut Ria, ada teori yang menyebutkan bahwa kelangkaan kelapa dan olahannya juga disebabkan banyaknya pengusaha kelapa yang gulung tikar akibat lahan perkebunan kelapa terendam air laut akibat abrasi pantai.

"Kemungkinannya kecil jika hanya karena abrasi pantai. Kelapa itu tanaman yang tidak memerlukan perawatan intensif tetapi tetap bisa berproduksi. Namun, faktanya, kelapa memang sedang diperebutkan. Harga santan yang dulu Rp3.500 per sachet kini naik menjadi Rp6.000. Bahkan, kelapa bulat yang sebelumnya bisa didapatkan dengan harga Rp10.000 kini semakin sulit ditemukan," ungkapnya. — azk,ndy/mh

# Memantau JORR dan Bendungan

**Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI. Ruas tol ini, memang, sangat strategis dalam menunjang mobilitas dan distribusi logistik di Jabodetabek.**



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi.

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan jalan tol, khususnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). "Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami, terutama terkait standar pelayanan minimum yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi," ujarnya, di Bekasi, Kamis (27/2/2025) silam.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberadaan kendaraan over dimension dan overloading (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kemacetan. Menurut Andi Iwan, keberadaan truk ODOL tidak hanya menghambat kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan pengguna jalan tol lainnya. "Kecepatan rata-rata minimum di jalan tol adalah 60 km/jam, tetapi sering kali tidak tercapai akibat keberadaan kendaraan ODOL yang hanya melaju 40-50 km/jam," jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem Multi-Lane Free Flow (MLFF) untuk mengatasi antrean panjang di gerbang tol. "Sampai sekarang, implementasi MLFF masih terkendala. Padahal, investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar, sekitar Rp4,5-4,7 triliun," katanya.

Komisi V menyoroti persoalan klasik dalam pembangunan jalan tol, seperti pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan. Menurut Andi Iwan, perencanaan yang matang harus dilakukan sebelum proyek dimulai, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari. Selain aspek operasional, ia juga menyinggung perlindungan bagi pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan. "Kami menerima banyak keluhan mengenai lambatnya penanganan kecelakaan dan proses klaim asuransi bagi korban," tambahnya.

## Tinjau Bendungan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor dapat diselesaikan tepat waktu serta memastikan seluruh dampak sosial dapat ditangani dengan baik. Ia menegaskan, pembangunan bendungan ini diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

"Bendungan ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata, sumber pembangkit listrik, dan memiliki berbagai manfaat lainnya," ujar Syaiful dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) di Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025) lampau.

Politisi Fraksi PKB ini berharap, seluruh tahapan pembangunan, termasuk pembebasan lahan, dapat berjalan lancar. "Pembebasan lahan harus bisa mencapai 100 persen, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan," tegasnya.



Ketua Komisi V DPR RI Lasaru menerima plakat dari mitra kerja saat kunker di Jatiasih, Bekasi.

“

Bendungan ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata, sumber pembangkit listrik, dan memiliki berbagai manfaat lainnya

Syaiful Huda  
Wakil Ketua Komisi V DPR RI

la juga meminta pemerintah memastikan mobilitas masyarakat dan lalu lintas di sekitar proyek tidak terganggu akibat pembangunan bendungan. Komisi V DPR RI, lanjutnya, mendorong pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah terdampak proyek. "Dampak proyek pembangunan tidak boleh

mengganggu aktivitas masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Syaiful menyoroti dampak sosial dari proyek ini, terutama terhadap 105 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembebasan lahan dan harus direlokasi. "Saat ini sedang disiapkan mekanisme relokasi. Berdasarkan paparan Pemerintah Daerah

(Pemda), terdapat 105 KK yang perlu mendapat afirmasi khusus, karena kondisi sosial-ekonominya rentan," jelasnya.

la menekankan, agar pemerintah menjamin bantuan fasilitas rumah layak huni bagi keluarga terdampak. "Kami akan memastikan hal ini kepada pihak terkait," tutup Syaiful.

ssb,ica/mh



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama tim, saat meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.



FOTO: CHASEI/VEL

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo (kanan), saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten.

**D**elegasi Komisi VI DPR yang dipimpin wakil ketuanya Eko Hendro Purnomo melihat dari dekat kegiatan produksi dan mendengarkan langsung dari direksi PT. Krakatau Steel di Cilegon, Banten. "Kami melihat industri baja kita itu strategis, tetapi di balik itu merugi, merugi, dan merugi, bahkan sempat dikatakan bangkrut. Ini semua perlu disupport dari kebijakan pemerintah agar menjadi industri baja yang membanggakan," katanya saat di Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025) lalu.

Ia melanjutkan, industri baja harus mendapatkan kebijakan terkait persaingan impor untuk konsumsi baja nasional dan mendapatkan dukungan dari Himbara, meskipun pernah ada hal buruk antara PT Krakatau Steel dan Himbara. "Dalam 10 tahun ke depan, negara kita sedang membangun, kebutuhan bajanya sangat banyak. Tapi, kenapa enggak diambil buah manis itu oleh industri baja nasional? Nah, selain itu,

## Krakatau Steel Butuh Dukungan, Rugi Triliunan Rupiah

**Dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, terungkap bahwa PT. Krakatau Steel mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. BUMN yang satu ini butuh dukungan pemerintah dan perbankan pemerintah, agar kembali menjadi industri baja kebanggaan bangsa.**

Himbara juga harus berperan dalam menyokong Krakatau Steel untuk bisa bangkit kembali," tambahnya.

Hal-hal tersebut yang menjadi sorotan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke

PT Krakatau Steel. Diharapkan, industri baja nasional mendapatkan perlindungan, bukan hanya business to business, tapi juga government to government.

## Tinjau IDSurvey

Di Semarang, Jawa Tengah, Komisi VI berkesempatan meninjau IDSurvey dalam pemenuhan standar kualitas produk lokal. Dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto, Komisi VI menggelar kunjungan kerja spesifik ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)/IDSurvey, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia.

Kunjungan ini bertujuan menilai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Tengah, khususnya dalam hal standar kualitas produk yang memenuhi kebutuhan pasar global. Delegasi Komisi VI langsung meninjau berbagai produk UMKM lokal binaan IDSurvey. Mereka mengunjungi berbagai stand-booth UMKM seperti Batik Tulis Lasem Rizki Barokah, furniture Manggar Natural, Esclave, kerajinan Sintia Craft, dan Lia Lumpia, bahkan melakukan

pembelian produk-produk lokal tersebut.

Dalam wawancaranya dengan Parlemenaria, Kamis (6/3/2025) lalu, Adisatrya mengapresiasi keberhasilan UMKM lokal binaan IDSurvey yang sudah mampu menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Singapura dan Jepang. Ia menyampaikan pentingnya peran BUMN dalam membina dan mendampingi UMKM, mengingat banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

"Yang kita harapkan adalah BUMN terus membina dan mendampingi UMKM. UMKM di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan," ujar Adisatrya. Ia juga mengimbau agar Kementerian BUMN dan IDSurvey terus memperkuat pendampingan terkait quality control produk ekspor, serta membantu UMKM dalam mengakses pasar, inovasi produk, desain, dan packaging.

Selain itu, Adisatrya juga memuji Kementerian BUMN yang telah mengoptimalkan teknologi dengan menyediakan platform marketplace PaDi BUMN, yang dapat membantu produk UMKM untuk memperluas

pangsa pasar ekspor. Ia menekankan pentingnya dukungan pendanaan, terutama bagi UMKM yang masih baru, melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Yang kita harapkan akses kepada finansial ini bisa terus diberikan kepada UMKM supaya mereka bisa naik kelas," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Adisatrya juga menekankan pentingnya sinergi yang lebih intens antara IDSurvey dengan Rumah BUMN yang sudah ada di berbagai daerah. Rumah BUMN berperan penting dalam mengidentifikasi UMKM yang berpotensi berkembang dan siap untuk melakukan ekspansi usaha.

Selain itu, Adisatrya memberikan apresiasi terhadap IDSurvey yang berperan aktif dalam sertifikasi produk, terutama produk makanan dan minuman, serta sertifikasi SNI untuk produk-produk seperti AC dan barang-barang lain. Hal ini dinilai sangat penting untuk melindungi konsumen di Indonesia, terutama dengan maraknya produk impor.

cas.pun/mh



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, saat kunjungan kerja spesifik ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)/IDSurvey, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia di Semarang.

# RUU Kepariwisataan Berdampak pada Kesejahteraan



Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke Bandung.

**Revisi UU Kepariwisataan sedang dilakukan Komisi VII DPR RI. Sektor ini sangat penting, tidak saja bisa menghidupkan ekonomi masyarakat luas, tapi juga meningkatkan devisa negara.**

**K**etua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam pertemuannya dengan pengelola dan asosiasi pariwisata di Bandung, Jawa Barat, mengatakan, setiap daerah perlu memiliki keunikan sendiri sebagai objek wisata. Dan RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas ini, ingin memberi dukungan dan penguatan sektor pariwisata di berbagai daerah, yang pada akhirnya

juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Saleh menyerukan, keunikan daerah itu penting untuk menarik wisatawan lokal maupun manca negara. Misalnya, Bali menekankan pada pelestarian alam dan budaya. "Bandung ini, kan, salah satu kota yang banyak didatangi masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu, Bandung pasti punya pengalaman dalam mengelola

pariwisata. ungkap Saleh dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025) lalu.

Saleh menyatakan bahwa semua masukan dari berbagai asosiasi wisata, termasuk asosiasi tour leaders dan hotel, akan digunakan sebagai referensi untuk memperkaya muatan RUU Kepariwisataan. "Kami ingin undang-undang ini membawa manfaat luas untuk kesejahteraan dan pengembangan pariwisata di Indonesia," jelasnya.

## Objek Wisata Mandalika

Di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.

"Banyak event dan MICE tingkat nasional serta internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari



**Setiap daerah perlu memiliki keunikan sendiri sebagai objek wisata. Dan RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas ini**

Saleh Partaonan Daulay  
Ketua Komisi VIII DPR RI

penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di sini? Laporan yang saya baca justru menunjukkan tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak di bawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari. Bagaimana peran pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan ini?," tegas Novita.

Ke depan, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberdayaan dan perlindungan masyarakat lokal. "Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR ke depan, utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisata. Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan," tutupnya.

### LPP TVRI dan RRI

Sementara di Medan, Sumatera Utara, delegasi Komisi VII menggelar



Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke KEK Mandalika.

pertemuan dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI Kota Medan. Dalam pertemuan itu, Komisi VII meminta TVRI dan RRI melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas layanan dan informasi bagi publik. Menurutnya, langkah ini menjadi penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang

sedang diterapkan.

"Kalau ada inovasi-inovasi yang dilakukan, itu bagus. Kemudian, belanja untuk hal-hal yang tidak mendesak sebaiknya ditahan dulu. Tapi, jangan sampai mengurangi kualitas layanan informasi kepada publik, karena berita adalah bagian paling esensial dari lembaga pemberitaan resmi negara," ujar Bane Raja Manalu saat mengikuti kunjungan spesifik ke TVRI dan RRI Medan, Sumatera Utara, Rabu (19/2/2025) silam.

Meski ada efisiensi, ia berharap informasi yang disampaikan oleh TVRI dan RRI harus tetap terjaga. Menurutnya, efisiensi hanya boleh dilakukan pada aspek-aspek yang tidak berdampak pada layanan utama. "Ini tetap menjadi catatan bagi kami di DPR. Sampai kapan efisiensi ini dilakukan? Harus ada batasan yang jelas. Jika tidak ada perubahan atau pergerakan sama sekali, berarti ada yang salah dalam pengelolannya. Tapi kalau efisiensi hanya diterapkan pada belanja yang tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan, itu masih bisa dimaklumi," kata legislator Dapil Sumut III ini. — [ais,jk,aar/mh](#)



Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu saat mengikuti Kunspek Komisi VII DPR RI ke TVRI dan RRI Medan, Sumatera Utara.

# Meninjau Persiapan Ibadah Haji 2025 di Beberapa Daerah

Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 di berbagai daerah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, mengapresiasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko (tengah), saat memimpin kunjungan kerja ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Sejauh ini, kami melihat persiapannya sudah cukup baik. Oleh karena itu, kami mengapresiasi hal itu," ujar Singgih saat memimpin kunjungan kerja ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025) silam. Persiapan itu, lanjutnya, terlihat dari proses pendaftaran calon jemaah,

pemeriksaan kesehatan, proses seleksi petugas haji, hingga persiapan lainnya seperti pelayanan calon jemaah haji selama di asrama, keberangkatan dari Banjarmasin, serta kesiapan di Tanah Suci selama pelaksanaan haji 2025, yang dinilai baik.

Sementara di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Anggota Komisi

“

Ada lebih dari 160 jemaah yang tertolak di sistem. Hal ini perlu ditelusuri, agar jika ada yang gagal berangkat, penggantinya bisa segera ditetapkan

Lisda Hendrajoni  
Komisi VIII DPR RI

VIII DPR RI Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 di Padang Pariaman berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa tantangan yang harus segera ditangani agar jemaah dapat berangkat dengan nyaman dan aman.

"Alhamdulillah, kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat hari ini sangat bermanfaat. Kami menerima banyak laporan serta masukan terkait persiapan ibadah haji 2025. Secara umum, persiapan berjalan baik, tetapi ada kendala yang perlu segera ditindaklanjuti,



Ketua Kunjungan Kerja, Lisda Hendrajoni (kanan), saat melihat langsung kondisi fasilitas Asrama Embarkasi Haji Padang Panjang, di Sumatera Barat.

seperti ada lebih dari 160 jemaah yang tertolak di sistem. Hal ini perlu ditelusuri, agar jika ada yang gagal berangkat, pengantinya bisa segera ditetapkan," ujar Lisda kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan Komisi VIII DPR ke Padang Pariaman, Sumbar, Rabu (26/2/2024) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII menyoroti kondisi Asrama Embarkasi Haji Padang Panjang, yang rencananya akan menjadi pusat persiapan keberangkatan jemaah haji Sumbar. Dengan kapasitas tampung sekitar 1.000 orang, fasilitas ini masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Saat ini, telah diajukan anggaran sebesar Rp143 miliar untuk perbaikan, namun Lisda menilai jumlah tersebut masih kurang.

"Setelah kami tinjau langsung, masih banyak bagian yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Bangunan yang sudah berdiri selama tujuh tahun ini perlu perawatan menyeluruh agar bisa digunakan dengan optimal. Seluruh anggota Komisi VIII mendukung peningkatan fasilitas ini. Kami berharap perbaikan

ini dapat segera terwujud demi pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji," tambah politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Terakhir, di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menilai, embarkasi Surabaya siap untuk menyambut jemaah haji tahun 2025. "Jawa Timur sudah siap, karena

termasuk embarkasi terlama setelah Jakarta. Jadi, asramanya cukup besar, daya tampungnya juga cukup besar," ujar Nanang kepada Parlementaria di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025) lalu.

Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak di embarkasi Surabaya adalah penambahan fasilitas untuk mengantisipasi penumpukan jemaah saat terjadi penundaan penerbangan (delay). "Contoh, pada saat ada delay pesawat, kan, jemaah numpuk nih. Nah, apabila numpuk yang berangkat masih di situ, masih nunggu yang baru akan masuk. Nah, ini jadi heboh," jelasnya.

Selain itu, Nanang juga menyoroti regulasi yang semakin ketat, seperti kewajiban menyiapkan lima kloter sekaligus. Hal ini dinilai memberatkan petugas haji. "Demikian juga dengan regulasi yang ketat seperti sekarang ini, misalkan harus menyiapkan lima kloter, kasihan petugasnya," katanya.

Untuk itu, Nanang berharap pihak terkait bisa segera melengkapinya fasilitas yang dibutuhkan dan mengevaluasi regulasi yang ada, demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya.

— ayu,uf,bia/mh



Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra, saat mengikuti kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur.



FOTO: OJ/VEL

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini, bersama tim saat mengecek keamanan makanan dan minuman ke Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang.

**D**i Jawa Timur, delegasi Komisi IX DPR RI dipimpin wakil ketuanya M. Yahya Zaini, mengunjungi Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang. Komisi IX mengapresiasi BPOM yang tak pernah absen mengamankan produk makanan dan minuman di Jawa Timur, terutama selama Ramadan.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan BPOM dan Dinkes Kota Malang dalam menjaga keamanan pangan selama bulan Ramadan. Selain itu, Komisi IX mendorong sinergi lebih lanjut antara pemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait guna memperkuat upaya pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat," ungkap Yahya di Malang, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025) lalu.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, selain pengawasan

## Mengawasi Makanan Jelang Ramadan di Berbagai Daerah

**Komisi IX DPR RI menggelar pengawasan makanan jelang dan selama Ramadan. BPOM berperan aktif dalam pengawasan ini, agar semua makanan yang dikonsumsi, aman dan sehat. Pengawasan dilakukan di tiga daerah, Jawa Timur, NTB, dan Riau.**

langsung, Dinkes Kota Malang dan Balai Besar POM setempat juga harus

aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kuliner

untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan pangan dan mendorong penggunaan bahan-bahan makanan yang aman.

Sementara itu, di Lombok Tengah, Tim Komisi IX DPR RI berkunjung ke Pasar Renteng. Selain mengawasi keamanan pangan juga meninjau harga bahan pokok. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mengatakan, dalam menjaga keamanan pangan, ia mendorong adanya sinergi antarpemerintah daerah, BPOM, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan yang aman dan sehat.

"Kami meminta BPOM untuk terus melakukan inspeksi mendadak dengan mengambil sampel dari produk pangan olahan dan juga obat tradisional. Tujuannya adalah memastikan atau menjamin produk pangan olahan yang dijual di pasar terjamin secara keamanan untuk masyarakat," jelas politisi Fraksi Partai



FOTO: RIDWAN/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, saat diwawancarai di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Pasar Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

NasDem di Lombok Barat, NTB, Kamis (27/2/2025) silam.

Terakhir, di Pekanbaru, Riau, Anggota Komisi IX DPR RI Maharani, meminta BPOM meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahan pangan yang aman dikonsumsi dan bebas dari zat berbahaya.

"Kami menemukan pangan yang tidak layak konsumsi, mengandung boraks dan pewarna tekstil, saat melakukan uji sampling secara acak di pasar tradisional," ujar Maharani dalam wawancara dengan Parlementaria di Pekanbaru, Riau, Kamis (27/2/2025) lalu.

Legislator dari daerah pemilihan Riau I ini menegaskan bahwa BPOM perlu lebih masif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, baik sebagai konsumen maupun produsen. "Kami meminta Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, agar bersama-sama menjaga keamanan pangan, terutama menjelang bulan Ramadan, agar masyarakat dapat hidup sehat dan terhindar dari risiko keracunan makanan," tambahnya.

Hasil kunjungan Komisi IX DPR RI ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan pangan guna menjamin keamanan dan kualitas konsumsi masyarakat. — oji,rdn,cas/mh



FOTO: CHASBI/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI, Maharani, saat mengecek keamanan makanan ke salah satu pasar di Pekanbaru, Riau.

# Komisi X DPR Awasi Pengisian PDSS, Beasiswa KIP, dan Kesejahteraan Dosen

**Kasus pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) kembali menjadi sorotan karena proses yang tidak sesuai prosedur atau kesalahan pengisian data sering kali menyebabkan masalah dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.**

**B**anyak sekolah dan siswa menghadapi kendala teknis maupun administratif yang menghambat kelancaran sistem, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keadilan dan transparansi dalam penerimaan di perguruan tinggi.

Melihat fenomena itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esty Wijayanti, memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi X untuk melihat dari dekat persoalan ini di SMAN 1 Depok, Sleman, DIY, Kamis (20/2/2025) silam. "Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Komisi X akan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah agar sistem penerimaan mahasiswa baru semakin inklusif," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Esty menekankan pentingnya sistem penerimaan mahasiswa baru yang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esty Wijayanti, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik ke SMAN 1 Depok, Sleman, DIY.

lebih adil, transparan, dan inklusif. Karenanya, ia mengajak para pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Sleman untuk berdialog terkait rancangan undang-undang (RUU) Sisdiknas yang telah masuk

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Sehingga, lanjut Esty, kunjungan ini diharapkan menghasilkan solusi konkret bagi berbagai kendala yang dihadapi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan SNPMB, serta memastikan bahwa hak pendidikan setiap siswa tetap terjamin.

Kemudian, di Surakarta, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, merespons keluhan perguruan tinggi swasta (PTS) terkait kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Ia memastikan bahwa pada 2025, alokasi mahasiswa penerima KIP akan lebih merata antara PTN dan PTS.

"Insyaallah tahun 2025 ini, mahasiswa penerima beasiswa KIP sebarannya akan merata, baik di perguruan tinggi negeri maupun

swasta. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) agar porsi KIP lebih proporsional di seluruh Indonesia," ujar Lalu Hadrian, di UNS, Surakarta,



FOTO: SINGGIH/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah.

Jawa Tengah, Kamis (20/02/2025) silam.

Menurutnya, kebijakan pemerataan ini penting agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memilih PTS tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan pendidikan. Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah agar mengakomodasi aspirasi dari PTS dalam penentuan kuota KIP ke depan.

"Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa di PTS juga mendapatkan akses beasiswa KIP yang adil, tidak hanya terpusat di PTN. Ini demi meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali," tegasnya.

Terakhir, di Surabaya, Jawa Timur, Komisi X membahas tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdiktisaintek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024. Anggota Komisi X

DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kalau kita mau dosen mengajar dengan baik, tentu kesejahteraannya harus terjamin. Jangan sampai nanti seperti di dalam rapat komisi, para dosen mengatakan, bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah keleleran," ujar Dewi kepada

Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025) lalu.

Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen dan pemerintah harus mulai memikirkan untuk dipenuhi. "Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita," tambahnya.

— [ssb](#), [skr](#), [we](#)/mh



FOTO: WILGA/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, saat kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah.

# Melihat Penerapan Sistem Cortax di Daerah

**Sistem layanan pajak berupa Coretax merupakan inovasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kemudahan akses para wajib pajak. Di berbagai daerah sudah diterapkan. Dan Komisi XI DPR RI berkepentingan melihat dari dekat penerapan sistem ini di kantor-kantor pelayanan pajak DJP di daerah.**

**D**i Bandung, Jawa Barat, Komisi XI DPR RI mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa

Barat I di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025) lalu, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak dengan sistem Coretax.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, yang memimpin kunjungan ini, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta menarik dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar. Hanif menjelaskan, pasca-implementasi Coretax, pertumbuhan bruto dan neto Kanwil DJP Jawa Barat I periode Januari–Februari 2025 menunjukkan tren positif.

“Tapi di sini cukup menarik, karena kita menemukan bahwa terjadi kenaikan penerimaan pajak di bulan Januari–Februari, baik secara bruto maupun neto. Namun, memang belum bisa dipastikan apakah kenaikan ini akibat Coretax atau bukan. Teman-teman di Kanwil masih memerlukan waktu untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Coretax terhadap peningkatan penerimaan di periode tersebut,” ujar Hanif.

Menurut legislator dari Dapil Jawa Tengah X itu, capaian positif Kanwil DJP Jawa Barat I justru berbanding terbalik dengan penerimaan pajak



FOTO: KIKI/VEL

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Bandung, Jawa Barat.



FOTO: HUSEN/VEL

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi, saat mengikuti pertemuan Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Herry Wirawan, di Surakarta (Solo).

nasional hingga Februari 2025, yang hanya mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025. Angka tersebut turun 30,19 persen dibandingkan penerimaan pajak pada periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp269,02 triliun atau 13,53 persen dari target APBN 2024.

"Kalau secara nasional, datanya menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada Januari–Februari mengalami kontraksi sekitar 30 persen. Jadi, ini merupakan temuan yang cukup berbeda, di mana di pusat mengalami kontraksi, tetapi di Kanwil DJP Jawa Barat I justru sebaliknya," ungkap Hanif.

Kendati demikian, Hanif menegaskan bahwa belum dapat disimpulkan apakah penurunan penerimaan pajak nasional disebabkan oleh Coretax. "Saya kira terkait dengan sistem Coretax sendiri, kita belum bisa menyimpulkan. Baru berjalan dua bulan, tentu kita harus bersabar untuk melihat bagaimana implementasi selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kakanwil DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, melaporkan

bahwa capaian penerimaan pajak bruto Kanwil DJP Jawa Barat I pada Januari–Februari 2025 mencapai Rp5,32 triliun, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp5,01 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto Kanwil DJP Jawa Barat I pada periode yang sama mencapai Rp4,72 triliun, tumbuh dari Rp4,51 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara di Surakarta, Jawa Tengah, Komisi XI DPR juga meninjau penerapan Coretax di KPP Pratama Surakarta. Kantor pajak Surakarta tampak dikunjungi banyak wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya dengan sistem Coretax.

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi kepada Parlemen, usai mengikuti pertemuan Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta Herry Wirawan, di Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025) lalu, berharap, sistem Coretax bisa dijadikan sarana komunikasi wajib pajak bila mendapatkan kesulitan dalam layanan pajak.

"Kita meninjau KPP Pratama Surakarta dan kita lihat sendiri bagaimana aplikasi Coretax ini dipakai oleh wajib pajak. Kita berharap pelayanan ini menjadi lebih baik. Persoalan itu pasti ada, tapi bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan antara pusat dan pemakai yang di wilayah. Kemudian wajib pajak juga bisa secara mudah dan bisa berkomunikasi bila ada kesulitan tentang coretax," ungkap Didik.

Politisi PDI Perjuangan ini, menjelaskan, penerapan Corerax tidak secara langsung berdampak pada pendapatan negara. Coretax hanya sistem pencatatan, bagaimana pendapatan negara itu tercatat secara terintegrasi dan tidak ada potensi penurunan pendapatan.

"Kita sudah sepakat, bila Coretax ini masih ada kendala, kita masih bisa pakai software yang lama. Tidak ada alasan ketika Coretax bermasalah, akhirnya wajib pajak tidak memberikan kewajiban mereka," tutur legislator dapil Jateng V ini.

qq,mh/mh

# Memantau Ketersediaan Energi Selama Ramadan



FOTO: AARON/VEL

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali guna memastikan kesiapan sektor energi selama Ramadan libur panjang Idulfitri di Denpasar, Bali.

**Jelang dan selama Ramadan, Komisi XII DPR RI aktif melakukan pengawasan atas ketersediaan energi untuk kebutuhan Ramadan dan Idulfitri. Sektor energi sangat krusial, karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.**

**D**ipimpin Ketua Komisi XII Bambang Patijaya, Komisi XII menggelar pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), serta PT. Pertamina di Denpasar, Bali, Rabu

(12/03/2025) lalu.

Bambang meminta laporan kesiapan menghadapi lonjakan wisatawan yang diprediksi akan meningkat secara signifikan. Mengingat Bali merupakan destinasi wisata nasional utama, kesiapan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan

dan masyarakat menjadi perhatian utama.

"Kami meminta laporan tentang bagaimana kesiapan dalam menghadapi bulan Ramadan ini dan tentunya bagaimana menyongsong libur panjang Idulfitri. Sesuai prediksi, akan terjadi lonjakan wisatawan yang luar biasa, dan hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat Bali merupakan daerah tujuan wisata nasional yang harus siap memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Selain itu, kesiapan pasokan tenaga listrik di Pulau Bali juga menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Komisi XII menerima laporan dari PLN mengenai penyediaan tenaga listrik

di Bali dan menyoroti beberapa aspek yang masih perlu dioptimalkan. Langkah-langkah strategis pun telah diputuskan agar penyediaan listrik berjalan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Kami berharap mitigasi yang dilakukan tepat, langkah-langkahnya juga tepat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipastikan dengan baik. Ini adalah bentuk kepedulian serta kontribusi nyata kita terhadap masyarakat," tambah politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain listrik, isu pasokan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian. Komisi XII menanyakan dampak dari penegakan hukum yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yakni Patra Niaga dan kilang Pertamina, terhadap pasokan BBM. Namun, Pertamina menegaskan bahwa sistem distribusi berjalan normal tanpa kendala.

"Tadi kami bertanya apakah peristiwa hukum yang terjadi pada

Patra Niaga dan kilang Pertamina dapat memengaruhi suplai BBM. Namun, telah dipastikan tidak ada masalah dan sistem berjalan dengan baik," ungkap Bambang. Ia juga menegaskan bahwa isu terkait kualitas BBM, termasuk dugaan praktik blending yang terjadi pada periode 2018- 2023, sudah ditangani dengan uji laboratorium oleh Ditjen Migas serta lembaga survei independen.

"Saat ini, produk yang dipasarkan Pertamina sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Ditjen Migas. Peralite dengan RON 90 berisi RON 90, Pertamina dengan RON 92 berisi RON 92, dan Pertamina Turbo dengan RON 98 juga sesuai spesifikasinya. Masyarakat tidak perlu khawatir karena langkah-langkah antisipasi telah dilakukan," tutupnya.

Sementara di Lampung,

Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, menekankan pentingnya ketepatan sasaran distribusi

subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji serta mempertanyakan jaminan kualitas produk Pertamina. Ia menyoroti kebijakan distribusi yang selama ini hanya berfokus pada kuota dan target tanpa memastikan apakah penerima subsidi benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Distribusi itu bukan hanya soal mengejar target kuota, tetapi juga memastikan bahwa penerima subsidi ini benar-benar yang berhak secara hukum," tegas Dewi di Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025), silam. Ini menjadi perhatiannya, lantaran menerima banyak laporan mengenai penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG, termasuk oleh pihak yang seharusnya tidak berhak.

Apalagi, terangnya, salah satu isu yang sering muncul adalah penyaluran elpiji subsidi 3 kg yang seharusnya untuk masyarakat miskin, akan tetapi masih kerap dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak memenuhi kriteria. [aar,um/mh](#)



Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

# Meninjau Lapas Kalteng dan Nusakambangan

**Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) menyelesaikan persoalan di Lapas Kelas IIB Sampit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah secara objektif dan profesional.**

“Jadi, penyelesaian ini harus benar-benar dilakukan secara objektif dan profesional, dengan melihat kejadian yang sebenarnya, bukan

karena adanya kepentingan tertentu. Saya yakin Dirjen Pemasyarakatan mampu mengatasi masalah ini, dan kami di Komisi XIII memberikan dukungan penuh dalam pengambilan

keputusan tersebut,” ujar Rinto saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Rabu (26/2/2025) lalu.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengapresiasi Kemenkumham yang telah sigap menindaklanjuti dan menangani permasalahan ini secara komprehensif melalui proses pemeriksaan, klarifikasi, penanganan, konsultasi, dan koordinasi. Ia juga menyebut bahwa kementerian telah merekomendasikan penjatuhan sanksi disiplin, baik sedang maupun berat, sesuai prosedur yang berlaku.

“Tadi kami sudah mendengar berbagai penjelasan dari para pihak terkait. Kami juga meminta kepada Dirjen Pemasyarakatan agar memberikan sanksi seberat-beratnya jika memang terbukti bersalah, tetapi tetap memulihkan kedudukan mereka apabila tidak bersalah,” pungkas Rinto.

Legislator Dapil Jawa Tengah IV itu berharap Kemenkumham dapat



FOTO: JAKA/VEL

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah.

lebih mengoptimalkan pengawasan, terutama terkait peredaran narkoba, kepemilikan handphone di dalam lapas, serta praktik jual beli kamar tahanan yang masih terjadi.

"Kami juga berharap adanya tes narkoba berkala, tidak hanya untuk warga binaan, tetapi juga bagi para petugas rutan dan lapas di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa memastikan lingkungan

menghasilkan produk sisa berupa material-material yang terbang dan terendapkan, yang terbang itu disebut fly ash, dan yang mengendap di bawah itu bottom ash.

Menurutnya, meskipun langkah ini memiliki potensi positif, pengelolaan FABA harus dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat dampak kesehatannya yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. "Salah

"Selain dapat menyebabkan penyakit gangguan pernapasan, FABA bisa menyebar di lingkungan luas, masuk ke dalam air, udara, dan tanah. Tentu kita berharap pengelolaan FABA ini tidak menjadi bahaya kesehatan baru di tengah minimnya akses pengobatan di Lapas Nusakambangan," tambahnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pemerintah



Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

pemasyarakatan benar-benar bersih dari narkoba," terang Rinto.

Sementara dalam kunjungan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menyoroti kolaborasi antara Lapas Nusakambangan dan PLN terkait pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) yang baru saja dilakukan pada Februari 2025 lalu.

Fly Ash and Bottom Ash atau yang lebih sering disingkat FABA, adalah material sisa dari proses pembakaran batubara. Secara fisik, FABA berbentuk seperti debu halus yang mirip dengan abu dari gunung berapi. Batubara yang dibakar itu

satu hal yang menarik perhatian saya yaitu kolaborasi pengembangan fasilitas di Lapas Nusakambangan dengan PLN yang baru saja dilakukan pada bulan Februari 2025 ini, yakni terkait pemanfaatan FABA. Setahu saya, FABA ini berbahaya jika tidak dikelola dengan baik," ujar Muslim di Cilacap, Jateng, Sabtu (22/02/2025) lalu.

Ia menjelaskan, FABA dapat menjadi ancaman kesehatan serius jika tersebar ke lingkungan tanpa pengelolaan yang tepat. Limbah ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan serta mencemari air, udara, dan tanah di sekitarnya.

dan pihak terkait harus memastikan bahwa program ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi penghuni lapas maupun masyarakat sekitar. Ia juga meminta adanya transparansi dalam penerapan standar keamanan dan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa depan.

"Harus ada standar yang jelas dalam pengelolaan limbah ini. Jangan sampai inovasi yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru bagi kesehatan dan lingkungan," pungkasnya.

[jka.gal/mh](https://jka.gal/mh)

# PHK Massal Pukulan Besar Bagi Industri Nasional

Menjelang Ramadan, dunia ketenagakerjaan Indonesia justru sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Beberapa perusahaan yang dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan sekitar 3.200 pekerjanya antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, dan PT Bapintri.



Anggota Komisi IX DPR RI  
Netty Prasetyani Aher.

Bahkan, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang menutup pabriknya pada 1 Maret 2025 juga mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja. Putusan pailit salah satu raksasa tekstil Asia Tenggara ini menjadi pukulan berat bagi industri tekstil nasional dan ketenagakerjaan di sektor ini.

Sebagai langkah konkret, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menegaskan bahwa pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Politisi Fraksi PKS ini meminta pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), memastikan pencairan manfaat JKP dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

"Kebutuhan masyarakat pasti meningkat saat Ramadan ini dan apalagi menjelang Idulfitri. Saya meminta BPJS Ketenagakerjaan, pencairan JKP bagi pekerja terdampak dapat dilakukan secara praktis tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Jangan sampai mereka kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga," ungkapnya.

FOTO: MUNCHEN/VEL

Selain itu, Netty juga mendorong agar hak-hak pekerja yang masih dapat diupayakan tetap diperhatikan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). "Meski saat ini pengelolaan Sritex berada di tangan kurator pascaputusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), saya berharap ada upaya untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan haknya, termasuk pembayaran THR menjelang Idulfitri," tegasnya.

Senada dengan Netty, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh pekerja Sritex. Menurutnya, kebutuhan pekerja pada saat bulan puasa dan lebaran meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan memberikan diskresi kepada pemerintah dan, jika perlu, memberikan subsidi untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemberian THR.

"Saya sudah menyampaikan kepada Pak Wamen kemarin malam terkait masalah THR, yang utama yang akan kami kawal adalah agar THR ini bisa diberikan kepada seluruh pekerja Sritex," ujar Irma. "Kami juga meminta kepada pemerintah, kalau perlu, memberikan subsidi untuk menanggulangi pemberian THR. Selain itu, kami juga menekan agar kurator segera mengeluarkan hak-hak yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap pekerja, terutama terkait THR," tambahnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti potensi masalah lainnya, seperti pesangon dan hak-hak pekerja lainnya, yang mungkin terabaikan oleh kurator. Ia mengingatkan pentingnya perusahaan baru yang menggantikan Sritex tetap memenuhi kewajiban kepada pekerja, tanpa mengabaikan hak-hak yang sudah menjadi hak mereka.



FOTO: MUNICHEN/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani.

Di sisi lain, Irma juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, akan ada investor baru yang akan meneruskan operasi Sritex. Ia juga menambahkan bahwa dalam dua minggu ke depan, perusahaan masih akan melanjutkan aktivitas operasional dan beberapa aset Sritex akan disewakan, yang nantinya akan menjadi modal untuk memulai kembali produksi.

Lebih lanjut, Irma menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan tidak terlalu mudah memberikan putusan kepailitan kepada perusahaan. "Pemerintah juga harus menekan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak terburu-buru mengajukan kepailitan, karena banyak perusahaan yang akhirnya tutup di Indonesia namun membuka cabang di negara lain seperti Vietnam," ungkap Irma.

Menurutnya, jika perusahaan menutup operasionalnya di Indonesia, namun membuka cabang di luar negeri dengan produk yang sama, maka perusahaan tersebut tidak seharusnya diberikan izin kembali untuk beroperasi di Indonesia. "Kita tuntut juga nasionalisme mereka, jangan cuma nasionalisme pekerja dan rakyat Indonesia saja yang diminta," tegas legislator Dapil Sumatera Selatan II ini.

Irma juga menyoroti masalah bagi pekerja Sritex yang berusia di atas 45 tahun, yang akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang sama di perusahaan baru. Ia pun menekankan pentingnya solusi untuk masalah ini dan mendorong agar pihak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan perhatian lebih pada pekerja berusia lanjut, agar mereka tidak tertinggal dalam persaingan.

 we/mh

# Sidang Komite Status Perempuan Perkenalkan Perjuangan RA Kartini

**Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN-Women menggelar sidang bersama soal perempuan. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selalu disuarakan. Ada yang terlupakan bahwa Indonesia punya tokoh perempuan kaliber dunia, RA Kartini yang patut diangkat di forum internasional.**

**B**ertempat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, delegasi DPR RI hadir mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW). Delegasi DPR diwakili para anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang hadir menyimak dan mengusulkan banyak isu perempuan pada sidang

ke-69 yang digelar pada 10-21 Maret tersebut.

Adalah Anggota BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Haprani yang mengangkat tokoh Kartini di forum yang dihelat pada 12 Maret lalu itu. Bicara perempuan, sangat ideal bila mengingat perjuangan Kartini di Indonesia yang mengangkat martabat perempuan pada kesadaran kolektif betapa

perempuan perlu dihargai dan dicintai.

Pinka Hapsari, begitu ia akrab disapa, ingin mempopulerkan tokoh Kartini kepada dunia. Menurutnya, masih banyak tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam keterangan persnya yang diterima Parlemen, ia mengaku mendapat kehormatan bisa hadir di forum tersebut.

"Merupakan suatu kehormatan berada di sini bersama Anda semua hari ini. Tema pertemuan tahun ini tepat waktu," kata Pinka saat berbicara dalam salah satu sesi sidang CSW ke-69 itu. Tema yang diambil dalam sidang kali ini sangat relevan dengan tokoh perempuan di Indonesia. "Tema tersebut mengingatkan saya pada tokoh feminis terkemuka di Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini,"



Anggota BKSAP DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, dalam sesi kedua Sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (11/3).

FOTO: BKSAP/VEL

jasas cicit Proklamator Bung Karno tersebut.

Pinka lalu mengutip pandangan Kartini bahwa kita tidak dapat kembali ke masa ketika perempuan diperlakukan tidak adil. Kata-kata Kartini ini sangat relevan dengan isu global yang membincang

hadir di CSW membahas partisipasi perempuan dalam politik, dengan target representasi perempuan yang lebih setara dan inklusif dalam pengambilan kebijakan negara.

Lebih lanjut, Pinka yang juga Anggota Komisi XI DPR itu menilai anggota parlemen harus



FOTO: IST/VEL

Anggota BKSAP DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, bersama delegasi BKSAP lainnya, saat mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau sidang Komite Status Perempuan ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, Rabu (12/3/2025).

perempuan. ini. Diungkapkan Pinka, sudah lebih dari satu abad sejak Kartini menyuarakan kesetaraan gender, isu tersebut belum terselesaikan.

Bahkan, 30 tahun berlalu sejak Deklarasi Beijing dan satu dekade sejak Agenda PBB untuk SDGs (Sustainable Development Goals), kesetaraan gender tetap menjadi isu kontroversi yang belum terselesaikan. "Kesetaraan gender masih menghadapi tantangan berat di dunia dengan struktur patriarki. Maka, tindakan afirmatif sangat penting dalam mengatasi hambatan sistematis yang meminggirkan perempuan," sebutnya.

Adapun tema sesi sidang untuk anggota parlemen CSW kali ini adalah 'Parlemen dan Beijing +30: Melawan Kemunduran dan Mengubah Paradigma Menuju Kesetaraan Gender'. Dalam sidang sesi 1, delegasi parlemen negara-negara global yang

memaksimalkan pengawasan legislasi dan fungsi anggaran untuk mempromosikan agenda SDGs ke-5 yakni agenda untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya atau tantangan terhadap isu kesetaraan gender, kami DPR RI ingin menyoroti tiga tindakan transformatif yang diambil oleh Parlemen Indonesia," ungkap anak sulung Puan Maharani ini.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah IV tersebut mengungkapkan, isu krusial yang dibahas delegasi BKSAP DPR RI pada Sidang CSW ke-69 di New York adalah memeriksa peran parlemen dalam memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi.

Sementara Anggota BKSAP Rahayu Saraswati yang ikut dalam sidang itu, memandang bahwa kesetaraan gender adalah isu kemanusiaan. Untuk itu, perlu



FOTO: BKSAP/VEL

Anggota BKSAP DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, saat mengikuti sesi 1 sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

dukungan dari seluruh pihak tanpa terkecuali demi terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang.

Sara menyampaikan hal tersebut dalam intervensinya pada sesi 1 sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) yang mengikat tema "Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity".

"Kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan semata, akan tetapi isu kemanusiaan. Kita membutuhkan laki-laki untuk juga menerapkan gender equality di semua bidang," tegasnya dalam keterangan persnya. Politisi perempuan dari Fraksi Partai Gerindra ini turut mengapresiasi hadirnya anggota parlemen laki-laki di forum ini untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender.

tn/mh

Novita Hardini

# Dorong Setiap Rumah Jadi Lumbung Hidup



Anggota DPR RI Novita Hardini, saat ikut menanam sayur melalui kegiatan program PKK Pangan Bergizi, di Jawa Timur.

**Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini mengambil langkah nyata dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satunya melalui program PKK Pangan Bergizi, yang bertujuan mendorong warga untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.**

**K**enaikan harga cabai yang sempat menyentuh Rp100 ribu per kilogram menjadi perhatian serius. "Saat ini mungkin masih bisa dibeli, tetapi jika harga terus naik dan diikuti lonjakan kebutuhan pokok lainnya, daya beli masyarakat tentu akan semakin terpuruk," ujar Novita, awal Maret lalu.

Sebagai respons cepat, Novita segera mengumpulkan jajaran Pokja PKK untuk merancang strategi konkret. Dari diskusi tersebut, lahirlah Gerakan Pangan Lestari PKK, yang diimplementasikan melalui pembagian bibit sayur, buah, serta benih ikan kepada masyarakat.

"Kami ingin masyarakat lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan menanam sendiri, mereka tidak akan sepenuhnya bergantung pada pasar," jelas Novita. Sebagai bagian dari pemantauan program, Novita meninjau langsung pelaksanaannya di berbagai desa, termasuk Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, dan Desa Kerjo, Kecamatan Karang.

la mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan kelompok Dasawisma di Desa Tegaren, yang berhasil mengembangkan kebun pangan bergizi, kolam lele, serta budidaya sayur-mayur di pekarangan rumah. "Tegaren bisa menjadi desa percontohan dalam ketahanan pangan. Hampir setiap rumah di sini sudah menerapkan program ini, dan saya berharap inovasi mereka dapat menginspirasi desa-desa lain di Trenggalek," ucapnya. gal/mh

# Taufan Pawe Berbagi Takjil di Bulan Ramadan

**Bulan Suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Segala perbuatan kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya di bulan ini. Meskipun sejatinya untuk berbuat baik tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan.**

**S**etidaknya hal itu juga yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe. Sebagai wakil rakyat dari daerah

pemilihan Sulawesi Selatan II sudah menjadi kebiasaan baginya bertemu langsung dan menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Namun, khusus di bulan

Ramadan, mantan wali kota Pare-Pare ini menyempatkan waktu bertemu dengan masyarakat lewat pembagian takjil gratis di beberapa titik ramai di Kota Pare-Pare pada pertengahan Maret lalu.

Pembagian takjil gratis di berbagai titik strategis ini untuk membantu umat Islam yang masih berada di jalan, untuk bisa berbuka puasa tepat waktu. Kegiatan itu digunakan politisi dari Fraksi Partai' Golkar ini untuk bersilaturahmi dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat pun tak ingin kehilangan momen untuk berswa foto dengan wakilnya di DPR RI.

"Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami dapat terus bersilaturahmi, berkomunikasi dengan masyarakat, sambil berbagi. Melihat antusiasme warga dan bisa berdekatan dengan masyarakat merupakan sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa di bulan suci ini," ungkap Taufan.  [ayu/mh](#)



FOTO: IST/VEL

Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, saat bertemu dengan masyarakat sekaligus membagikan takjil gratis di Kota Pare-Pare.

# Rokhmat Ardiyan

## Gelar Buka Bersama dan Santunan Yatim



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Rokhmat Ardiyan, saat memberikan kepada anak yatim, di Purwawinangun, Kuningan.

**Anggota DPR RI Dapil Jabar X dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan yang juga tokoh pengusaha kenamaan Kuningan, baru saja menggelar silaturahmi dan buka puasa. Acara digelar di Purwawinangun, Kuningan, Jawa Barat.**

Selain buka bersama dan silaturahmi, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak-anak yatim, yang disalurkan Rokhmat melalui beberapa lembaga amil zakat dan sedekah. Selain santunan, acara

juga diisi dengan siraman rohani sebelum akhirnya buka bersama.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap guyub dan membuktikan kecintaan pada Kuningan, dengan kerja sama nyata dalam pembangunan," ungkapnya di

Kajene Flores, awal Maret lalu.

Kapoksi Komisi XII DPR ini, mengatakan, "Saya akan terus berkomunikasi dengan bupati dan pemerintah daerah agar terjadi harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Sinergi ini penting untuk pembangunan Kuningan ke depan," papar Rokhmat.

Acara ini turut dihadiri ratusan undangan dari berbagai unsur, mulai dari bupati, wakil bupati, dan Forkopimda Kabupaten Kuningan. Selain itu, hadir juga beberapa tokoh lokal, seperti anggota DPRD, tokoh partai, wartawan, dan influencer.

tn/mh

## Irsan Sosiawan Gading Realisasikan Infrastruktur Kelistrikan

Anggota komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan Gading, merealisasikan aspirasi masyarakat Aceh Tamiang dan Langsa, Aceh terkait perbaikan beberapa infrastruktur kelistrikan di wilayah tersebut. Kini masyarakat Aceh Tamiang dan Langsa dapat menyambut Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman.

**R**ealisasi infrastruktur kelistrikan tersebut, setelah Irsan berkoordinasi dengan PT PLN UID Aceh dan PLN UP3 Langsa. "Menjelang Ramadan, masyarakat harus bisa menjalankan ibadah dengan tenang, tanpa khawatir listrik padam di tengah sahur atau berbuka. Saya ingin memastikan masalah ini di tangani dengan cepat dan tepat," ungkap Irsan di Aceh

Tamiang, awal Maret lalu.

Sebelumnya, Aceh Tamiang telah lama mengalami ketidakstabilan listrik, yang menyebabkan berbagai peralatan elektronik rusak dan aktivitas harian terganggu. Muhammad Yunus, salah satu warga, mengungkapkan kekecewaannya karena selama ini permohonan pemasangan listrik yang diajukan kepada pihak PLN tidak kunjung mendapat tanggapan.

"Sudah tiga kali kami mengajukan permohonan ke PLN untuk pemasangan tiang listrik, tetapi tidak ada realisasi. Listrik yang sering padam membuat alat elektronik cepat rusak. Kami butuh solusi nyata, terutama menjelang Ramadan," keluh Yunus. Saat memasuki bulan Ramadan, kebutuhan listrik yang stabil menjadi semakin penting, mengingat banyaknya aktivitas keagamaan serta kebutuhan rumah tangga yang bergantung pada daya listrik.

Legislator Dapil Aceh II itu meminta PLN UID (Unit Induk Distribusi) Aceh dan PLN UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Langsa melakukan pemasangan tiang listrik, serta instalasi listrik ke rumah-rumah warga. Berbekal koordinasi yang solid dengan pihak terkait, Irsan berhasil merealisasikan harapan masyarakat untuk pemasangan tiang listrik di enam titik strategis di Aceh Tamiang.  we/mh



Anggota komisi DPR RI, Irsan Sosiawan Gading, saat merealisasikan pemasangan tiang listrik, serta instalasi listrik ke rumah-rumah warga di Aceh Tamiang.

# Syafrudin Gelar Silaturahmi, Jaga Spirit Ramadan

Sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sebesar 87,2 persen, bulan Ramadan menjadi bulan yang dinilai penuh berkah. Namun, tahun ini cukup berbeda. Indonesia kini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat.



Syafrudin saat menggelar pertemuan dengan masyarakat dengan dapilnya.

**A**nggota DPR RI dari Fraksi PKB Syafrudin memilih tidak diam. Pada tahun 2025, kelas menengah Indonesia turun sebesar 20 persen selama enam tahun terakhir. Fenomena ini muncul disebabkan oleh kurangnya pekerjaan formal, ketidakpastian investasi yang tidak memadai dalam industri berpenghasilan tinggi, dan

ketergantungan pada pekerjaan komoditas berupah rendah.

Kalimantan Timur yang berpenduduk 4,045 juta jiwa tentu mengalami imbas dari tantangan ekonomi tersebut, khususnya di bulan Ramadan. Daya belanja masyarakat yang turun membuat roda ekonomi pelan bergerak. Memahami kondisi tersebut, Syafrudin menggelar rangkaian kunjungan di Provinsi

Kalimantan Timur untuk menyerap aspirasi rakyat. Tidak berhenti hanya menjalin silaturahmi, dirinya ingin anak-anak yatim dan kaum dhuafa tetap bisa menjalani dengan tenang.

"Tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu juga bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa dengan tenang, karena mendapat perhatian dan bantuan. Harapannya agar masyarakat bisa merasakan perhatian dan kepedulian dari wakil rakyat," ungkap Syafrudin saat membuka agenda silaturahmi dengan masyarakat di Kota Samarinda, Kaltim, pertengahan Maret lalu.

Warga Kota Samarinda yang hadir antusias menerima paket sembako yang dibagikan. Beberapa di antara mereka pun menyampaikan keluhan soal semakin tingginya harga elpiji 3 kilogram, yang tidak sesuai dengan HET. Menanggapi hal ini, Syafrudin menyampaikan bahwa DPR RI akan selalu mengawasi kebijakan pemerintah terkait distribusi sekaligus penjualan gas elpiji agar tepat sasaran dan tepat harga.

Pun, saat ini, jelasnya, DPR RI telah melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif tentang regulasi elpiji 3 kg dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kajian tersebut difokuskan pada opsi distribusi tepat sasaran sesuai kontrak yang diberikan PT Pertamina (Persero) kepada agen dengan menjamin masyarakat yang berhak tetap mendapatkan subsidi elpiji 3 kg.

um/mh



FOTO: IS/VEL

Anggota DPR RI Fathi, saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Bandung.

## Fathi Menjaga Nilai-nilai Kebangsaan

**Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menegaskan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu ia sampaikan dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan di Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Februari silam.**

**D**alam sambutannya, Fathi menekankan bahwa pemahaman terhadap Empat Pilar sangat penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan, kita bisa membangun

masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan sejahtera," ujar Fathi.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga demokrasi dan kesejahteraan bangsa. Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik, harus dihadapi dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi

keuangan dan ekonomi, Fathi juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara teoritis, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, termasuk dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Acara ini berlangsung dengan penuh antusiasme, di mana peserta aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat Kota Bandung dan Cimahi, termasuk perwakilan dari berbagai kecamatan, Fathi menyampaikan materi Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia mengaku, sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. "Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah," tutupnya.

 hal/mlh

# Abdul Fikri Faqih Perjuangkan Hak Guru JSIT di Jateng

**Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, menyatakan komitmennya memperjuangkan aspirasi guru-guru swasta di Jawa Tengah, khususnya yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama perwakilan JSIT Jawa Tengah di Semarang, Februari silam.**



Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih, usai mendengar aspirasi guru-guru swasta dalam audiensi bersama perwakilan JSIT Jawa Tengah di Semarang.

**D**alam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, salah satunya inpassing atau penyetaraan status dan hak guru swasta dengan guru negeri. Sunarto, perwakilan JSIT Jateng, menegaskan bahwa kompleksitas birokrasi dalam proses inpassing berdampak pada kesetaraan pengakuan profesionalisme guru.

"Kami bersilaturahmi dengan Bapak Abdul Fikri Faqih untuk menyampaikan aspirasi para guru, termasuk perjuangan hak-hak guru terkait inpassing," ujar Sunarto, yang juga Sekretaris Bidang Organisasi dan Profesi JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Selain inpassing, para guru juga mengeluhkan sulitnya memperoleh sertifikasi, yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan. Bahkan, banyak guru swasta yang menerima gaji lebih

rendah dibandingkan guru negeri dengan kualifikasi yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Fikri Faqih menyatakan kesiapannya menjembatani aspirasi para guru JSIT dengan pihak-pihak terkait. Ia mengakui bahwa meskipun dirinya tidak berada di Komisi X yang menangani pendidikan secara langsung, Komisi VIII tetap memiliki keterkaitan erat dengan Kementerian Agama, yang menaungi pendidikan Islam.

"Alhamdulillah, saya menerima kunjungan dari JSIT yang mewakili berbagai daerah. Mereka menyampaikan aspirasi, dan meskipun saya tidak di Komisi X, kami tetap memiliki kemitraan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan BNPB, yang semuanya memiliki hubungan erat dengan dunia pendidikan," jelas Fikri.

Di akhir pertemuan, Fikri menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia berjanji akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan, khususnya bagi guru-guru swasta yang selama ini masih menghadapi banyak tantangan.

"Pendidikan adalah faktor vital bagi kemajuan bangsa. Kami akan berupaya menjembatani aspirasi ini dengan dirjen terkait agar ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada para guru," pungkas Fikri, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX.

— ssb/mh

# Muazzim Akbar

## Urgensi Menjaga Persatuan Bangsa

**Anggota DPR RI Fraksi PAN, Muazzim Akbar menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman adalah hal yang sangat penting.**

**P**ernyataan tersebut ia sampaikan dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang berlangsung di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Februari silam.

Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang, pelajar, mahasiswa, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan aparatur kelurahan di tiga kecamatan, Muazzim menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

"Empat Pilar Kebangsaan ini bukan sekadar teori, tetapi harus menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di

tengah keberagaman yang ada," ujar politisi yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini. Empat Pilar Kebangsaan yang dimaksud mencakup Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia.

Kegiatan ini tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga melibatkan dialog interaktif dan sesi tanya jawab. Untuk menambah semangat peserta, panitia juga memberikan hadiah merchandise kepada mereka yang aktif berpartisipasi. Salah satu peserta, Zainul Amri, mahasiswa UIN Mataram, mengapresiasi kegiatan ini.

"Sosialisasi seperti ini sangat penting, terutama untuk generasi muda, seperti pelajar, mahasiswa, Karang Taruna, agar mereka tidak melupakan jati diri bangsa, tidak melupakan sejarah, dan memahami secara betul konsep bernegara," ujar Zainul. Melalui sosialisasi ini, Muazzim berharap masyarakat semakin memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia. hal/mh

“

**Sosialisasi seperti ini sangat penting, terutama untuk generasi muda**



Anggota DPR RI Muazzim Akbar saat menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Mataram.

# Ramadan Ngantor

## Harmoni Ibadah dan Profesionalisme



Foto: Farhan/vel

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat memberikan sambutan pada acara "Ramadan Ngantor", sebuah inisiatif Biro Pemberitaan Parlemen yang berlangsung di Gedung Nusantara 4 (Pustakaloka), Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

**Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum istimewa bagi umat muslim untuk meningkatkan ibadah sekaligus mempererat kebersamaan. Di lingkungan parlemen, semangat ini diwujudkan dalam acara "Ramadan Ngantor", sebuah inisiatif Biro Pemberitaan Parlemen yang berlangsung di Gedung Nusantara 4 (Pustakaloka), Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.**

**A** cara ini melibatkan berbagai unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, seperti pegawai TVR Parlemen, Bagian Metaksos, Penerbitan, serta pengurus Korpri, UPZ, dan DKM Baiturahman. Dengan nuansa religius yang kuat, kegiatan ini dirancang

untuk memberikan keseimbangan antara ibadah dan profesionalisme, sehingga pegawai tetap produktif sembari mendekati diri kepada Allah SWT.

Tak hanya di situ, pada 20 maret lalu atau malam ke-21 Ramadan, digelar pula Itikaf di Masjid Baiturrahman, sebuah tradisi

pada setiap akhir Ramadan yang dilestarikan di lingkungan DPR RI. Suasana Ramadan Ngantor kian menciptakan atmosfir religi yang kental dan meneduhkan.

Acara Ramadan Ngantor digelar di Gedung Pustakaloka, DPR RI, dengan menyuguhkan kemeriahan, seperti penampilan nasyid, wejangan agama, dan apresiasi bagi para pemenang kultum dan azan. Salat Asar berjamaah menjadi titik temu spiritual yang mempererat kebersamaan. Setelah itu, kajian agama oleh Ustadz Hilman Fauzi membahas keutamaan mengejar pahala di bulan Ramadan. Bulan ini adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga hadir memberi sambutan. Dalam sambutannya, ia menekankan

pentingnya keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan. "Takwa bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan dan kejujuran," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran Biro Pemberitaan Parlemen dalam meningkatkan transparansi DPR RI. Menurutnya, keterbukaan dalam pemberitaan menjadi bentuk nyata dari nilai-nilai ketakwaan yang diwujudkan dalam pekerjaan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat disiplin, kejujuran, dan keikhlasan dalam bekerja.

"Ketakwaan menjadikan kita lebih jujur, disiplin, dan ikhlas. Jika pekerjaan kita diniatkan sebagai ibadah, maka setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai pahala," kata Indra. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Ramadan sebagai ajang mempererat silaturahmi dan solidaritas, bukan hanya di bulan suci ini tetapi dalam keseharian.

Santunan kepada 100 anak yatim tak lupa dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial. Mereka menerima paket sembako dan bantuan



Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera dalam kegiatan Nuzulul Qur'an dan Santunan Anak Yatim Dhuafa yang diselenggarakan oleh DKM Baiturrahman Setjen DPR/MPR/DPD RI, bekerja sama dengan KORPRI dan UPZ Setjen DPR RI di Masjid Baiturrahman.

finansial, simbol kepedulian pegawai parlemen terhadap sesama. Akhirnya, ketika azan Magrib berkumandang, kebersamaan makin terasa. Berbuka puasa bersama jadi kenikmatan tersendiri.

Salat Maghrib berjamaah, makan malam, salat Isya, dan tarawih terus melanjutkan rangkaian acara malam itu. Sebagai penutup, tadarus Al Quran pun disenandungkan. Ini bukan sekadar acara seremonial Ramadan, lebih dari itu, merupakan aksi solidaritas, silaturahmi, dan mengukuhkan kembali religiusitas

para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan Nuzulul Quran dan Santunan Anak Yatim Dhuafa yang diselenggarakan DKM Baiturrahman Setjen DPR/MPR/DPD RI, bekerja sama dengan KORPRI dan UPZ Setjen DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Mardani juga memberikan ceramah tentang pentingnya Al Quran dalam kehidupan umat Islam. Ia menekankan bahwa Al Qur'an bukan hanya sebagai kitab petunjuk hidup, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

"Quran itu pembawa kemuliaan, apapun yang dilekatkan dengan Quran, dia akan mulia. Bulan Ramadan menjadi mulia karena didalamnya diturunkan Al Quran. Malaikat Jibril menjadi panglima para malaikat karena membawa wahyu Al-Qur'an. Nabi Muhammad menjadi nabi terbaik, panglima para nabi karena membawa Al Quran," kata Mardani, Senin (17/3/2025) lalu.

ssb/mh



Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, saat acara "Ramadan Ngantor", di Gedung Nusantara 4 (Pustakaloka), Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).



Oleh:  
**dr. Indah Febrina P**  
RSIA Amanat,  
Kota Makassar

# Kenali Kehamilan Ektopik Sejak Dini

Kehamilan adalah momen yang membahagiakan bagi banyak wanita. Namun, tidak semua kehamilan berjalan dengan normal. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi adalah kehamilan ektopik, yaitu kondisi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel dan berkembang di luar rahim, biasanya di tuba falopi.

**K**ehamilan ektopik adalah kondisi medis yang berbahaya dan perlu ditangani segera. Jika tidak, kehamilan ini bisa menyebabkan pecahnya tuba falopi, perdarahan hebat, bahkan mengancam nyawa ibu. Oleh karena itu, penting bagi wanita memahami faktor risiko, gejala, serta cara diagnosis dan pengobatan kehamilan ektopik agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

## Apa Itu Kehamilan Ektopik?

Dalam kehamilan normal, sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke dalam rahim dan menempel di dinding rahim untuk berkembang menjadi janin. Namun, pada kehamilan ektopik, sel telur justru menempel di luar rahim, yang paling sering terjadi di tuba falopi. Selain itu, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di ovarium, rongga perut, atau serviks, meskipun sangat jarang.

Karena lokasi tersebut tidak dirancang untuk menampung janin, kehamilan ektopik tidak dapat berkembang secara normal dan

berisiko menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani.

## Faktor Risiko Kehamilan Ektopik

Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seorang wanita mengalami kehamilan ektopik. Berikut ini adalah beberapa penyebab utama yang perlu diwaspadai:

### 1. Riwayat kehamilan ektopik sebelumnya.

Jika seorang wanita pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya, kemungkinan besar dia akan mengalaminya kembali di kehamilan berikutnya.

### 2. Infeksi atau peradangan pada tuba falopi.

Infeksi seperti Penyakit Radang Panggul (PID) atau salpingitis dapat merusak atau menyumbat tuba falopi. Hal ini menyebabkan sel telur yang telah dibuahi kesulitan mencapai rahim dan malah berkembang di tempat yang tidak seharusnya. Studi dalam *International Journal of Women's Health* menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat infeksi tuba falopi memiliki

risiko lebih tinggi mengalami kehamilan ektopik

### 3. Penggunaan alat kontrasepsi tertentu.

Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) memiliki risiko kecil, tetapi tetap ada untuk mengalami kehamilan ektopik, jika kehamilan terjadi saat menggunakan alat ini.

### 4. Merokok.

Merokok dapat mengganggu fungsi tuba falopi, sehingga menyulitkan pergerakan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim.

### 5. Riwayat operasi di area panggul.

Operasi sebelumnya, seperti operasi pengangkatan kista atau sterilisasi yang tidak berhasil, bisa menyebabkan jaringan parut yang menghambat perjalanan sel telur.

## Gejala dan Tanda Kehamilan Ektopik

Pada awalnya, kehamilan ektopik seringkali memiliki gejala yang mirip dengan kehamilan normal, seperti telat menstruasi, mual, dan nyeri payudara. Namun, seiring



berjalannya waktu, muncul tanda-tanda khusus yang harus diwaspadai, antara lain:

- 1. Nyeri perut bagian bawah.**  
Nyeri ini biasanya terasa di salah satu sisi perut, tergantung di mana kehamilan ektopik terjadi. Rasa nyeri bisa semakin parah jika tuba falopi mengalami ruptur atau pecah.
- 2. Perdarahan vagina tidak normal.**  
Perdarahan bisa lebih ringan atau lebih berat dari menstruasi biasa. Warna darah cenderung lebih gelap dibandingkan darah haid.
- 3. Pusing, lemah, atau pingsan.**  
Jika kehamilan ektopik menyebabkan perdarahan internal, tekanan darah bisa turun drastis, sehingga menyebabkan

pusing atau bahkan pingsan. Jika tuba falopi pecah, perdarahan hebat dapat terjadi dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, jika mengalami gejala di atas, segera periksakan diri ke dokter.

## Diagnosis Kehamilan Ektopik

Untuk memastikan apakah seseorang mengalami kehamilan ektopik, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, antara lain:

- 1. Tes Kehamilan (hCG Test)**  
Tes ini mengukur kadar hormon hCG (human chorionic gonadotropin) dalam darah. Pada kehamilan ektopik, kadar hCG sering kali lebih rendah dari kehamilan normal.

## 2. Ultrasonografi (USG Transvaginal)

USG transvaginal dilakukan dengan memasukkan alat khusus ke dalam vagina untuk melihat lokasi kantung kehamilan. Jika tidak ditemukan kantung kehamilan dalam rahim, dokter akan mencurigai adanya kehamilan ektopik.

## Penanganan Kehamilan Ektopik

Kehamilan ektopik tidak dapat diselamatkan, sehingga harus segera ditangani untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Yaitu, pengobatan bahkan jika tidak dideteksi dengan dini kejadian kehamilan ektopik harus dilakukan operasi untuk mencegah perdarahan pada rongga perut. Ada 2 metode operasi yang biasa dilakukan yaitu:

- Laparoskopi adalah tindakan operasi dengan sayatan kecil untuk mengangkat kehamilan ektopik.
- Laparotomi: operasi besar yang dilakukan jika kondisi sudah lebih parah.

## Kesimpulan

Kehamilan ektopik adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Dengan mengenali faktor risiko dan gejalanya sejak dini, wanita dapat segera mencari bantuan medis sebelum terjadi komplikasi yang lebih parah.

## Pencegahan

Meskipun tidak semua kehamilan ektopik bisa dicegah, menghindari faktor risiko seperti merokok, infeksi menular seksual, dan melakukan pemeriksaan rutin dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi ini. Jika mengalami tanda-tanda kehamilan ektopik, segera periksakan diri ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. 🐾

WISATA

# Candi Cetho

*Keindahan Sejarah di atas Puncak  
Gunung Lawu*

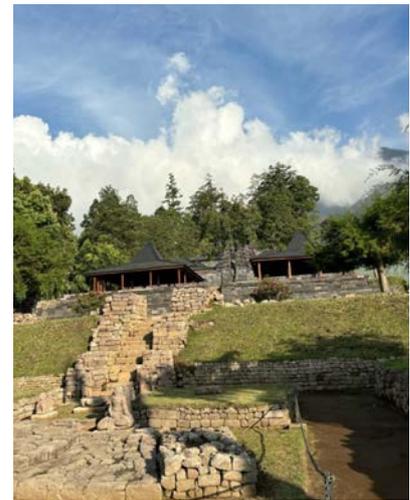
**Jawa Tengah menyimpan wisata sejarah berupa candi yang banyak menyimpan nilai budaya dan spiritual yang tinggi, salah satunya Candi Cetho yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Tak hanya menawarkan pesona arsitektur kuno yang memikat, tetapi juga menyuguhkan keindahan alam yang menenangkan.**



Sebagai salah satu situs bersejarah yang memiliki kaitan erat dengan kerajaan Majapahit, Candi Cetho menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi, baik bagi pencinta sejarah, wisatawan spiritual, maupun mereka yang sekadar ingin menikmati keindahan alam pegunungan Jawa Tengah.

Candi Cetho terletak di Dusun Ceto, Desa Ceto, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 oleh kerajaan Majapahit, meskipun hingga kini belum ada bukti yang pasti mengenai tahun pastinya. Nama "Cetho" sendiri dipercaya berasal dari kata "Cetha," yang berarti terang atau jelas, yang menggambarkan penerangan spiritual bagi para umat yang datang berziarah ke tempat ini.

Candi ini memiliki hubungan erat dengan aliran kepercayaan Hindu-Siwa, meskipun di tempat ini juga ditemukan unsur-unsur kepercayaan lokal yang kuat. Candi Cetho memiliki struktur yang

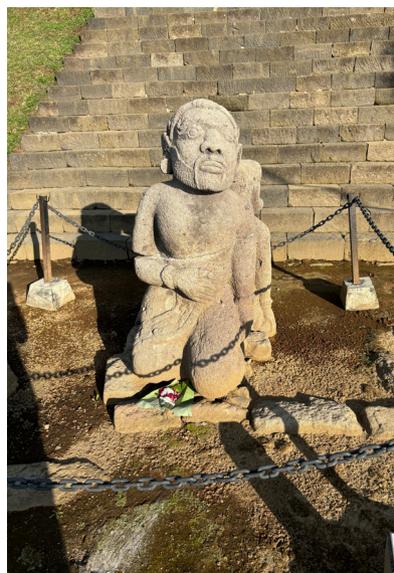
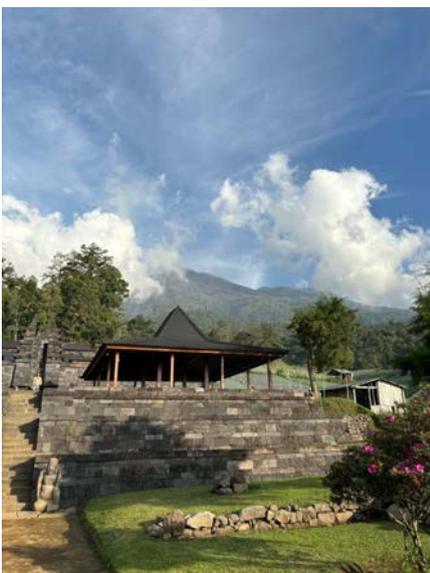


berbeda dengan candi-candi Hindu lainnya di Indonesia. Bangunannya terdiri dari beberapa teras bertingkat yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kesucian. Di setiap teras, terdapat

berbagai relief dan patung yang menggambarkan kehidupan spiritual dan mitologi Hindu. Beberapa arca yang ditemukan di Candi Cetho juga menunjukkan pengaruh agama Buddha.

Uniknya, di sekitar candi terdapat banyak batu besar yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan spiritual. Pengunjung juga akan menemukan beberapa tempat yang digunakan untuk meditasi di area sekitar candi.

Selain keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya, Candi Cetho juga menawarkan pemandangan alam yang luar biasa. Panorama alam Gunung Lawu yang memukau, dengan hutan pinus yang hijau, udara yang segar, serta suara gemericik air dari sumber mata air alami di sekitar kawasan tersebut dapat memanjakan indera. gal/mh



# Serba-serbi Ramadan

Berburu Takjil, Ngabuburit, Hingga Kue Khas Lebaran

Narasi: Naefuroji  
Foto: Runi, Jaka, Oji







Banjir orderan kue kering saat Ramadan..

**Senja merona di ufuk barat, ketika mentari berangsur membenamkan diri. Geliat lapak takjil di bilangan Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat berjajar rapi. Aneka hidangan seperti kolak, es buah, kurma, gorengan, hingga jajanan tradisional lainnya. Lokasinya yang strategis dekat kawasan perkantoran membuat pasar takjil ini selalu ramai dikunjungi. Murah, enak, dan lengkap menjadi alasan pembeli tumpah ruah di sini.**

**D**i tengah keramaian, masyarakat dari berbagai kalangan berbaur, dengan wajah-wajah ceria dan penuh harapan menanti waktu berbuka. Ada yang datang bersama keluarga, teman, bahkan rekan kerja, untuk berburu takjil favorit mereka. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan ini membuat momen berbuka terasa lebih spesial.

Di selatan Jakarta, nampak muda-mudi hingga orang tua ngabuburit menunggu bedug Magrib tiba. Setu Babakan Jagakarsa menjadi salah satu tempat andalan masyarakat bercengkerama menunggu waktu berbuka puasa. Ada yang asik mancing bersama teman dan pasangan, adapula yang hanya duduk-duduk di tepian danau sambil berbincang.

Adapula wahana sepeda air atau akrab dikenal bebek-bebekan, rekreasi ini hanya bertarif Rp10.000 per orang. Isman (45) salah satu pengelola bebek-bebekan mengungkapkan, rekreasi ini maksimal ditumpangi tiga

orang, satu putaran kira-kira 10 sampai 15 menit. Setelah puas naik bebek-bebekan, para pengunjung tak perlu khawatir mencari menu berbuka puasa. Pasalnya, di sepanjang pinggir Setu Babakan berbagai makanan dan minuman diujakan.

Yang tak luput menjelang lebaran adalah berburu kue khas lebaran. Adalah dodol Betawi Ny Law 55 milik Ibu Lin yang berlokasi di Neglasari, Kota Tangerang, yang sejak awal Ramadan sudah ramai pesanan. Produksinya bisa mencapai 300 sampai 400 kg per hari jika mendekati lebaran. Selain dodol, UMKM ini juga memproduksi kue rangjeng dan kue bulan.

Tak lengkap rasanya berlebaran tanpa sajian kue aneka rupa. DeliciSoes salah satu toko kue di bilangan Moh Kahfi No.36 Ciganjur Jakarta Selatan yang memproduksi palm cheese cookies, kastengel, nastar, lidah kucing dan coklat almond. Aneka rupa kue tersebut bisa menjadi bingkisan atau keranjang hadiah spesial menemani saat lebaran nanti. Selamat Idulfitri 1446 H. 🍪



FOTO: JAKA/VEL



FOTO: JAKA/VEL



FOTO: JAKA/VEL



FOTO: JAKA/VEL



FOTO: JAKA/VEL

Pembuatan kue bulan Ny. Law di kota Tangerang (atas).

Suasana Setu Babakan Jagakarsa, menjadi salah satu tempat bercengkerama menunggu waktu berbuka puasa. Ada yang asik naik wahana sepeda air atau akrab dikenal bebek-bebekan, mancing bersama teman dan pasangan, adapula yang hanya duduk-duduk di tepian danau sambil berbincang (Bawah).



FOTO: OJI/VEL





SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :

# Selamat Hari Raya Idulfilri

1 Syawal 1446 H

*Minal Aidzin Wal Faizin*

Mohon Maaf Lahir dan Batin



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri